

# **INOVASI KEBIJAKAN DAN KETIMPANGAN SOSIAL EKONOMI**



**UNIVERSITAS GADJAH MADA**

**Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar  
dalam Bidang Kebijakan Publik  
pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Gadjah Mada**

**Disampaikan pada Pengukuhan Guru Besar  
Universitas Gadjah Mada  
pada 22 Februari 2024**

**Oleh  
Prof. Dr. Agus Heruanto Hadna, SIP, M.Si**



*Bismillahirrahmanirrahim*

*Yang saya hormati:*

*Ketua, Sekretaris, dan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada,*

*Rektor dan Wakil Rektor Universitas Gadjah Mada,*

*Ketua, Sekretaris, dan Anggota Dewan Guru Besar Universitas Gadjah Mada,*

*Ketua, Sekretaris, dan Anggota Senat Akademik Universitas Gadjah Mada,*

*Para Guru Besar Universitas Gadjah Mada,*

*Para Dekan, Ketua Lembaga, dan Kepala Pusat Studi di Lingkungan Universitas Gadjah Mada,*

*Ketua dan Sekretaris Senat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada,*

*Dekan, Wakil Dekan, dan para Ketua Departemen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada,*

*Rekan-rekan Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa Universitas Gadjah Mada,*

*Tamu undangan, sanak keluarga, serta hadirin sekalian yang saya hormati.*

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

*Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.*

Alhamdulillahirobbil aalamiin, puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Swt, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk menghadiri acara pengukuhan saya sebagai Guru Besar di Universitas Gadjah Mada yang kita cintai. Terima kasih saya sampaikan kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang telah mengangkat saya dalam jabatan Guru Besar di bidang Kebijakan Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM per 1 Juni 2023 dan juga mengangkat saya dalam pangkat Pembina Tingkat I Golongan IVb sejak 1 Oktober 2023. Saya mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada para hadirin yang berkenan hadir secara langsung

maupun secara daring untuk menyimak pidato pengukuhan saya sebagai Guru Besar dalam bidang Kebijakan Publik. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan saya menyampaikan pidato yang berjudul:

## **“Inovasi Kebijakan dan Ketimpangan Sosial Ekonomi”**

*Hadirin yang saya hormati,*

### **LATAR BELAKANG**

Latar belakang pemilihan judul pidato pengukuhan Guru Besar yang saya sampaikan ini berawal dari kekaguman saya dalam sepuluh tahun terakhir perkembangan studi Kebijakan Publik yang terjadi secara dinamis sebagai akibat perkembangan teknologi digital. Salah satunya yang berkembang adalah studi tentang Inovasi Kebijakan. Namun di sisi lain, saya juga memiliki kecemasan terhadap pertanyaan saya, apakah inovasi kebijakan mampu meningkatkan kesejahteraan semua golongan dalam masyarakat? Kurang lebih dalam satu dekade terakhir hampir setiap saat kita membaca dan mendengar di media kata “inovasi” digunakan oleh pejabat publik, politisi, pengusaha, akademisi, dan bahkan masyarakat umum. Inovasi telah menjadi terminologi umum yang menguasai pemikiran, sikap dan tindakan dari banyak pihak dalam menyikapi perubahan zaman, khususnya dampak dari munculnya teknologi digital. Pemerintah pun menyikapi dengan membuat berbagai macam *innovation policy* di banyak sektor publik (*public sector innovation*).

Secara khusus, Pemerintah Indonesia telah menempatkan inovasi dan teknologi digital sebagai kebijakan nasional. Untuk mendukung hal tersebut pemerintah berinisiatif membuat inovasi kebijakan dengan menetapkan insentif fiskal baru, menaikkan anggaran yang lebih besar untuk membangun infrastruktur digital, dan menyusun mekanisme pendanaan baru untuk mendukung penelitian oleh publik. Setidaknya kebijakan inovatif yang berlandaskan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya ekosistem *start-up technology* ini telah menghasilkan tiga *unicorn* dan satu *decacorn* yang bernilai lebih dari \$10 miliar. Indonesia

juga sedang memperbanyak lulusan *science, technology, engineering, and math* (STEM) sehingga diharapkan akan menjadi penghasil terbesar keempat dari STEM di antara negara G20 pada tahun 2030 (Ministry of Finance of Republic of Indonesia, 2020). Perhatian yang besar terhadap *digitization* ini, menurut perhitungan McKinsey, karena Indonesia dapat mencapai pertumbuhan sekitar USD 150 miliar, atau 10 persen dari PDB pada tahun 2025 (Das, K., et al, 2016).

Pemerintah RI juga telah mengadopsi *Bali Fintech Agenda* tahun 2018 yang diinisiasi oleh IMF dan WB. Terdapat dua belas pilar *Fintech agenda* yakni: memanfaatkan teknologi *fintech* untuk meningkatkan penyediaan layanan keuangan; memperkuat persaingan dan komitmen pasar terbuka, bebas, dan kompetitif; mendorong inklusi keuangan melalui *fintech* dan mengembangkan pasar keuangan; memantau secara cermat untuk memahami perkembangan sistem keuangan; mengadaptasi kerangka peraturan dan praktik pengawasan ketertiban pengembangan dan stabilitas sistem keuangan; menjaga integritas sistem keuangan dan memodernisasi kerangka hukum untuk menyediakan lanskap hukum; menjamin stabilitas sistem moneter dan keuangan dalam negeri; mengembangkan infrastruktur data keuangan untuk mendorong pemanfaatan *fintech*; mendorong kerja sama internasional dan pertukaran informasi; dan meningkatkan pengawasan kolektif terhadap sistem moneter dan keuangan internasional (Das, K., et al, 2016).

Untuk mendorong gerakan inovasi ini Pemerintah Indonesia telah mengupayakan pengembangan jenis-jenis inovasi khususnya di sektor publik yang tersebar hingga ke beberapa daerah. Bahkan pemerintah mengaturnya melalui PP No.38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. Konsep inovasi yang didefinisikan dalam PP ini nampaknya lebih mengatur ke definisi output kebijakan inovatif. Hal ini tercermin dalam pasal yang menjelaskan bentuk-bentuk inovasi sektor tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan kewenangan lain yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Pengembangan inovasi untuk ketiga bentuk inovasi tersebut lebih banyak didorong oleh teknologi digital. Asumsi periode yang dipergunakan dalam pemanfaatan teknologi digital menurut PP ini adalah pada digitisasi dan digitalisasi. Sedangkan

periode transformasi digital<sup>1</sup> sektor publik sepertinya belum menjadi pertimbangan. Tulisan ini tidak memahami inovasi kebijakan hanya sebagai pembuatan dan pengembangan aplikasi digital karena hal itu hanya salah satu instrumen yang dimanfaatkan dalam mengembangkan kebijakan yang inovatif. Tulisan ini memaknai inovasi kebijakan secara lebih luas sebagaimana akan didiskusikan dalam bagian-bagian berikutnya.

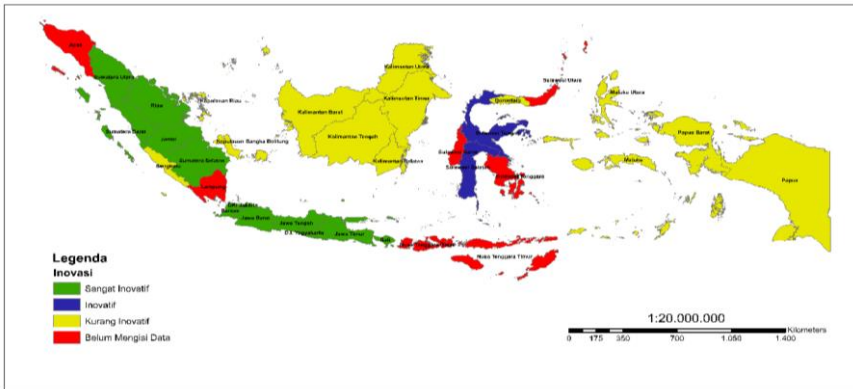
Hasil pembinaan inovasi daerah yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Badan Penelitian dan Pengembangan menghasilkan jumlah kebijakan atau program yang dikategorikan sebagai inovasi yang cukup signifikan. Berdasarkan laman dari Indeks Inovasi Daerah Kemendagri<sup>2</sup>, jumlah inovasi pemerintah daerah pada 2023 di Indonesia mencapai 28.539 inovasi, dengan rincian inovasi baru 1.362, inovasi uji coba 1.080, dan inovasi penerapan sebanyak 26.097. Namun faktanya, banyak dari inovasi yang dilaporkan tersebut tidak jalan dan tidak di-input di Pembinaan Inovasi Daerah. Dengan membaca peta pembinaan inovasi daerah, terdapat 12 Provinsi masuk dalam kategori sangat inovatif, 2 Provinsi masuk kategori inovatif, 13 Provinsi masuk kategori kurang inovatif, dan sisanya belum mengisi data. Sebagian besar jenis yang dikategorikan sebagai inovasi tersebut berbasis pada teknologi digital. Hal ini menjadi tantangan bagi Indonesia khususnya sektor publik karena masih terdapat sekitar 131 Kab/Kota di Indonesia yang kurang inovatif. Sebagian besar inovasi yang sangat inovatif berada di wilayah Indonesia bagian Barat khususnya Pulau Sumatera dan Pulau Jawa, sedangkan provinsi yang kurang inovatif lebih dominan di Pulau Kalimantan dan Papua (Gambar 1).

---

<sup>1</sup> Digitisasi diartikan sebagai proses konversi dari analog ke digital, digitalisasi adalah pemanfaatan media digital untuk meningkatkan nilai tambah proses kehidupan social, sedangkan transformasi digital lebih fokus pada manusia termasuk budaya ketimbang teknologinya.

<sup>2</sup> <https://indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id/>

Gambar 1. Peta Inovasi Daerah di Indonesia



Sumber: (Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri, 2020)

Perhatian terhadap inovasi kebijakan sektor teknologi yang sangat besar ini nampaknya masih belum didukung dengan jumlah pendanaan yang kecil jika diukur dari jumlah dana *Research & Development* (R&D) terhadap *Growth Domestic Products* (GDP). Jumlah pendanaan R&D yang menjadi ukuran utama kepedulian terhadap inovasi sebuah negara menunjukkan angka yang timpang di antara negara ASEAN. Data yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan RI dengan membandingkan antar negara ASEAN dalam hal jumlah dana R&D terhadap GDP tahun 2017 menunjukkan angka 0.08 persen. Bandingkan dengan Cambodia yang mencapai angka 0.12 dan Philippines 0.14, atau Vietnam 0.44. Angka semakin timpang jika kita bandingkan dengan Singapore yang sudah mencapai 2.18 persen terhadap GDP (Ministry of Finance of Republic of Indonesia, 2020).

Pada kasus di Indonesia, pendanaan R&D lebih banyak bersumber dari sektor publik. Data menunjukkan tingginya sumber pendanaan sektor publik dalam R&D. Angkanya mencapai 39 persen dari *Growth Domestic Expenditure* (GDE) untuk R&D yang dilakukan oleh pemerintah melalui pusat-pusat penelitian milik pemerintah, dan 35 persen dilakukan oleh lembaga-lembaga pendidikan tinggi. Hanya 26 persen dari dana R&D nasional berasal dari perusahaan swasta. Bandingkan dengan negara ASEAN lainnya, dunia usaha mempunyai porsi lebih besar dalam dana R&D nasional: 64 persen di Vietnam, 73

persen di Thailand, dan 61 persen di Singapura. Rendahnya pendanaan ini menyebabkan rendah pula jumlah paten yang terdaftar. Data menunjukkan Indonesia berada pada peringkat 83 dari 100 negara yang disurvei terhadap jumlah paten inovasi yang dihasilkan per satu juta penduduk. Bahkan lebih parah lagi untuk jumlah publikasi pada jurnal tentang *science* dan *technology*, Indonesia menempati rangking 97 (Ministry of Finance of Republic of Indonesia, 2020).

Secara keseluruhan dalam pengembangan inovasi, Indonesia masih memiliki sejumlah kelemahan pada tingkat kebijakan yakni: pengeluaran secara nasional untuk R&D terhadap GDP hanya sepersepuluh dari rata-rata negara ASEAN; banyak perusahaan tidak berinovasi, dan aktivitas R&D bisnis serta jumlah paten yang rendah; keluaran ilmiah masih kecil, hanya sedikit karya ilmiah yang diterbitkan di jurnal internasional; kurangnya harmonisasi antara regulasi tingkat nasional dan tingkat daerah tentang teknologi; industri sulit menemukan tenaga keterampilan khusus; lemahnya strategi yang komprehensif untuk penelitian inovatif dan kolaboratif level internasional; masih adanya peraturan yang menghambat investasi swasta; masih adanya kesenjangan dan disparitas regional terhadap cakupan *broadband*; rendahnya adopsi teknologi di kalangan industri; lemahnya regulasi yang mengatur perlindungan kekayaan intelektual dan privasi data, dan akses terhadap keuangan; terbatasnya dukungan teknologi baik untuk pelatihan, riset pasar, maupun kontrak R&D (Ministry of Finance of Republic of Indonesia, 2020).

Bagaimana capaian dari berbagai macam inovasi ini? Jika kita menggunakan data *Global Innovation Index* (GII) yang dikeluarkan *World Intellectual Property Organization* (WIPO) 2023 pada aspek *science and innovation investment* kita hanya unggul melalui *scientific publications*, tetapi belum pada *R&D investments*<sup>3</sup>, *venture capital deal numbers and values*, dan *international patents*. Pada aspek

---

<sup>3</sup> Data yang bersumber dari <https://www.statista.com/statistics/1352919/indonesia-randd-investment-from-gdp/> menunjukkan bahwa investasi R&D Indonesia terhadap GDP pada tahun 2022 hanya 0.24%. Bandingkan dengan Singapore yang sudah mencapai 1.9% dari GDP. Berdasarkan data ini, jumlah investasi R&D untuk Indonesia sudah membesar dibandingkan data yang dikeluarkan Kemenkeu RI tahun 2017, namun sebaliknya menurun untuk Singapore.



*technological progress* kita memang unggul dalam pengembangan *computing power*, tetapi masih bermasalah dengan *costs of renewable energy*<sup>4</sup>, *electric battery price*, *cost of genome sequencing*, dan *drug approval*. Pada aspek *technology adoption* kita bagus di *safe sanitation* dan *connectivity*, tetapi masih perlu mengembangkan kapasitas penguasaan *robotic technology*, *electric vehicles* dan *cancer radiotherapy*. Pada aspek *socioeconomics impact* yang positif adalah *life expectancy* yang meningkat, tetapi masih lemah dalam *labor productivity*<sup>5</sup> dan *carbon dioxide emissions*.

Data GII memberikan informasi posisi Indonesia pada tahun 2023 berada pada posisi 61 dengan skor 30.3 dari 132 negara yang disurvei. Indonesia masih kalah dengan beberapa negara di Asia Tenggara lainnya seperti Phillipines (56), Vietnam (46), Thailand (43), Malaysia (36), apalagi Singapore yang menempati posisi nomor 5 sebagai negara paling inovatif. Di antara kelompok negara *lower middle-income* Indonesia berada pada posisi ke-5 karena masih di bawah negara India, Vietnam, Ukraine, dan Philippines. Namun demikian catatan prestasi yang cukup membanggakan dari laporan GII tersebut adalah bahwa Indonesia (61) bersama dengan China (12), Turkiye (39), India (40), Vietnam (46), Philippines (56), dan Iran (62) menjadi kelompok negara berpendapatan menengah yang memiliki kenaikan ranking yang paling cepat selama dekade terakhir. Jika dibandingkan dengan data GII tahun 2013 Indonesia berada pada ranking 85, China (35), Turkiye (68), India (66), Vietnam (76), Philippines (90), dan Iran (113).

Di tengah prestasi Indonesia berdasarkan kenaikan yang signifikan dalam GII sebagaimana dijelaskan terdahulu, masih segar dalam ingatan kita hingga saat ini beberapa kebijakan dan program yang dinilai inovatif justru hasilnya meleset dari tujuannya. Pernahkah kita membaca atau mendengar bagaimana sebuah terobosan kebijakan

---

<sup>4</sup> Data yang bersumber dari <https://lestari.kompas.com/read/2023/12/25/120000286/energi-terbarukan-di-negara-berkembang-4-kali-lebih-mahal-daripada-negara>, menunjukkan bahwa biaya energi terbarukan di negara berkembang termasuk Indonesia 4 kali lebih mahal dibanding di negara maju.

<sup>5</sup> Analisis McKinsey 2015 menjelaskan bahwa tingkat *digitization* yang tinggi seharusnya meningkatkan *labor productivity*. Namun demikian, untuk Indonesia hal tersebut belum terjadi. Bahkan Indonesia masih kalah dibandingkan *labor productivity* dari Thailand, Malaysia, apalagi Singapore.

justru memberikan dampak negatif kepada masyarakat khususnya di lapisan bawah karena ketimpangan sosial ekonomi yang justru terjadi? Pernahkah kita mendengar dan membaca bagaimana sebuah kebijakan justru bertentangan dengan nilai-nilai budaya yang berlaku dalam masyarakat? Bahkan ada kebijakan yang justru meninabobokan masyarakat karena sifat protektifnya yang berlebihan. Terobosan kebijakan lain yang dinilai inovatif gagal diimplementasikan karena lemahnya kapasitas dan komitmen lembaga yang diberi mandat menjalankan kebijakan tersebut. Tidak kalah serunya adalah banyak kebijakan atau program yang tidak berlanjut karena kesalahan dalam mengidentifikasi akar masalah kebutuhan publik. Masalah lain yang jamak terjadi adalah kebijakan inovatif tidak mampu diimplementasikan karena kegagalan dalam mengembangkan inovasi tata kelola yang lebih akuntabel, transparan dan partisipatif.

Dampak inovasi ini belum banyak dirasakan masyarakat kalangan bawah. Sangat disayangkan apabila gelombang teknologi yang dipicu oleh digital tidak mampu mengangkat kehidupan sosial ekonomi masyarakat hingga tingkat terbawah. Data yang bersumber dari publikasi Badan Pusat Statistik tahun 2013 dan tahun 2023 yang diolah dari hasil Susenas menunjukkan bahwa terdapat ketimpangan social ekonomi (*inequality*) yang masih cukup besar jika diukur dengan Indeks Gini. Data tahun 2013 indeks Gini Indonesia adalah 0,41 dengan indeks Gini perkotaan sebesar 0,43 dan perdesaan 0,32. Pada Maret 2023 Indeks Gini sedikit menurun menjadi 0,388. Gini Ratio di perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,409; sedangkan Gini Ratio di perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,313. Sekali lagi terdapat perbedaan tingkat ketimpangan yang sangat signifikan antara kota dengan desa. Dalam definisi ini ketimpangan sosial ekonomi yang dimaksud merujuk pada ketimpangan social ekonomi, diukur dari kesenjangan pendapatan, tingkat kematian dan standar hidup (Pandey & Nathwani, 1996). Pendapat lain tentang *inequality* yang lebih sederhana disampaikan oleh Ravallion (2016) yakni kesenjangan tingkat kehidupan; misalnya, berapa banyak uang yang dimiliki oleh orang kaya dibandingkan orang miskin (Ravallion, M., 2016). Ketimpangan yang cukup signifikan juga terjadi antar wilayah. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia antar provinsi juga

menunjukkan ketimpangan yang ekstrem. Rata-rata nasional IPM tahun 2023 adalah 74,39 dan angka ini naik sedikit dari IPM tahun 2013 sebesar 73,81. Kendati demikian, angka ini sangat bervariasi antar provinsi. Data dari BPS menunjukkan bahwa angka tertinggi IPM provinsi adalah DKI Jakarta dengan angka 82,46 (sangat tinggi) dan terendah adalah provinsi Papua bersama empat provinsi lainnya di tanah Papua dengan angka 62,25 (sedang).

Simulasi yang dilakukan oleh Yusuf (2020) menunjukkan perbedaan antar daerah yang timpang dari efek penggunaan teknologi 4.0 (*digitalization, robotization, artificial intelligence*) terhadap pertumbuhan GDP per tahun. Jika ditambahkan adopsi teknologi 4.0, maka pada periode 2020-2040 rata-rata angka pertumbuhan GDP per tahun pada tingkat nasional adalah 5.75. Angka tersebut masih di bawah angka tertinggi pertumbuhan GDP per tahun dari wilayah yang selama ini menjadi primadona ekonomi Indonesia yakni pulau Jawa dengan angka 6.57 untuk periode yang sama. Angka pertumbuhan GDP per tahun pada periode tersebut antar pulau sangat bervariasi hingga yang paling rendah adalah Papua Maluku dengan angka 3.76 (Yusuf, A., 2020). Pertumbuhan ekonomi pada tingkat nasional dan regional ini hendaknya dipertahankan di atas 5 persen untuk menghindarkan Indonesia dari *middle income trap*.

Sementara itu, angka kemiskinan di Indonesia masih cukup tinggi meskipun secara keseluruhan terjadi penurunan. Data buku Statistik Indonesia 2014 angka kemiskinan di Indonesia pada 2013 adalah 11,47 persen (perkotaan 8,52 persen, dan perdesaan 14,42 persen). Angka ini mengalami penurunan menurut buku Statistik Indonesia 2023 menjadi 9,57 persen pada tahun 2022 (perkotaan 7,53 persen, dan perdesaan 12,36 persen). Angka kemiskinan antar daerah di Indonesia ini pun bervariasi. Tidak hanya angka kemiskinan provinsi yang berada di luar Jawa di atas rata-rata nasional, tetapi angka kemiskinan provinsi di Jawa pun ada yang di atas rata-rata nasional. Data kemiskinan tahun 2023 untuk DIY adalah 11,04 persen, Jawa Tengah 10,77 persen, dan Jawa Timur 10,35 persen. Ketiga provinsi berada di atas rata-rata kemiskinan tingkat nasional yakni 9,36 persen.

Untuk mengembangkan inovasi kebijakan ini tidak mudah pada kondisi saat ini. Pada tingkat global kita menghadapi perekonomian

yang tidak stabil, perang di beberapa wilayah yang berdampak secara internasional; kompetisi penguasaan sumber daya alam; pertumbuhan penduduk dunia yang tidak seimbang dan pengaruhnya pada migrasi global; perubahan iklim yang mengancam ketersediaan energi, pangan dan air; penguasaan teknologi yang berbeda antar negara, ketidakpastian keuangan global; serta ketidakpastian tatanan politik dan ekonomi global secara menyeluruh yang selalu berubah dengan cepat. Semua ini mengancam ketidakpastian dan kerentanan dalam pembangunan nasional khususnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Peringatan yang disampaikan oleh laporan UNDP pada 2015 menegaskan bahwa ketimpangan pendapatan telah terjadi secara masif di negara maju maupun negara berkembang (United Nation Development Program, 2015). Banyak negara mengakui bahwa globalisasi telah membuka pasar perdagangan dan keuangan suatu negara. Selanjutnya hal ini akan membantu para inovator untuk mengomersialkan produk mereka melalui ekspor. Namun, pendapat berbeda tentang globalisasi dan inovasi disampaikan oleh Anderson (2009); Krugman (2008), dan Stiglitz (2012). Ketiga pakar justru berpendapat bahwa penyebab meluasnya ketimpangan pendapatan adalah inovasi dan globalisasi. Oleh karena itu, globalisasi merupakan mediator penting dalam mempengaruhi hubungan antara inovasi dan ketimpangan pendapatan.

Disinilah peran inovasi kebijakan untuk mendorong ke arah perubahan sosial ekonomi secara adil dan merata di dalam masyarakat melalui pilihan kebijakan yang tepat. Pilihan inovasi kebijakan yang salah justru akan menyebabkan ketimpangan pendapatan antar kelompok di dalam masyarakat. Oleh karena itu, sangat menarik untuk mendiskusikan bagaimana persepsi publik dan teori menjelaskan tentang inovasi kebijakan dan *inequality*, bagaimana perbandingannya dengan kasus di negara lain, faktor apa yang menentukan kualitas inovasi kebijakan, dan bagaimana strategi untuk mengurangi dampak negatif inovasi kebijakan terhadap *inequality*.

*Hadirin yang saya hormati,*

## **PERSEPSI PUBLIK TENTANG INOVASI KEBIJAKAN DAN INEQUALITY**

### **1. Inovasi Kebijakan dan *Inequality* dalam Kajian *Systematic Literature Review***

Pencarian pada *data base* Scopus dilakukan pada 30 Desember 2023 dengan temuan sebanyak 1975 artikel dari tahun 2000 s.d. 2023. Jumlah publikasi terkait *Innovation & Inequality* cenderung terus meningkat dari tahun ke tahun, mencapai puncaknya pada tahun 2020 dengan 224 artikel, dan mencatat jumlah publikasi tertinggi pada tahun 2023 dengan 304 artikel.

Fenomena meningkatnya tulisan tentang *innovation* dan *inequality* ini mencerminkan minat dan fokus yang semakin meningkat dalam eksplorasi serta pembahasan ide-ide terkait inovasi dan dampaknya terhadap ketidaksetaraan. Peningkatan signifikan dalam jumlah publikasi terkait inovasi kebijakan pada tahun 2020 mencerminkan respons cepat terhadap tantangan persoalan publik yang mendesak. Hal ini terjadi seiring dengan penerapan kebijakan baru dan strategi inovatif guna mengatasi dampak kesehatan dan ekonomi yang ditimbulkan oleh pandemi. Dengan perhatian yang semakin meningkat terhadap aspek-aspek ini, para peneliti dan praktisi telah memperluas eksplorasi mereka terhadap berbagai ide dan konsep, mencari solusi yang efektif untuk meredakan ketidaksetaraan yang berkembang.

### **Analisis kata kunci yang muncul dalam *policy innovation* dan *inequality***

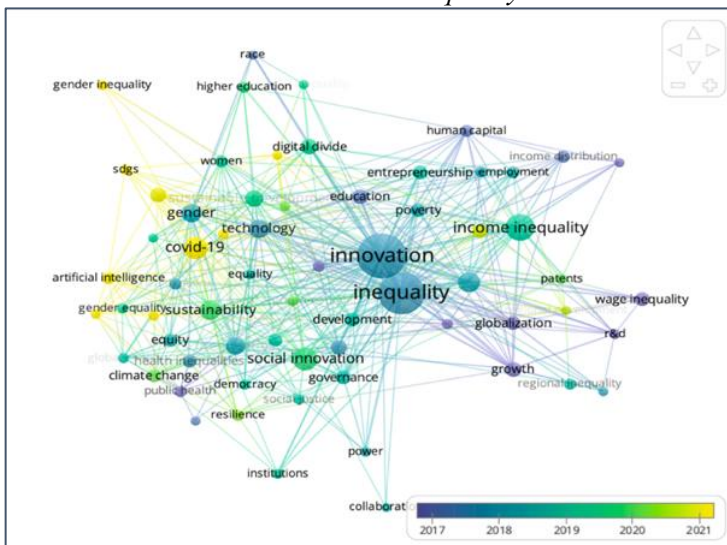
Dari hasil analisis kata kunci menggunakan visualisasi VOSviewer pada literatur terkait *Innovation & Inequality*, tampak bahwa beberapa isu krusial muncul sebagai fokus utama dalam publikasi-publikasi tersebut (Grafik 1). Terdapat lima kata kunci yang paling banyak muncul yakni: *income inequality*, *social innovation*, *COVID-19*, *economic growth*, dan *sustainability*. Isu yang mendominasi perbincangan adalah "*income inequality*" atau ketidaksetaraan pendapatan. Fenomena ini mencerminkan kekhawatiran dan kesadaran terhadap kesenjangan ekonomi yang semakin membesar di berbagai lapisan masyarakat

sebagai akibat munculnya inovasi di berbagai sektor ekonomi. Selanjutnya, "*social innovation*" juga muncul sebagai isu yang sering dibahas. Ini menandakan bahwa ada upaya yang signifikan untuk mencari solusi inovatif yang dapat membawa perubahan positif dalam mengatasi tantangan kesenjangan sosial dan ekonomi. Inovasi sosial dianggap sebagai instrumen penting untuk memecahkan masalah ketidaksetaraan yang kompleks. Isu "*COVID-19*" juga banyak muncul dalam pembahasan inovasi karena banyak tuntutan kebijakan inovatif khususnya di sektor kesehatan dan perekonomian untuk mengatasi pandemi *COVID-19* yang merebak pada 2020-2022. Isu "*economic growth*" umumnya dikaitkan dengan inovasi karena pada saat dimana banyak negara mengalami keterbatasan dalam ketersediaan sumber daya alam, maka inovasi khususnya berbasis teknologi digital adalah solusi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Inovasi juga selalu dikaitkan dengan "*sustainability*" karena inovasi selalu dikaitkan dengan upaya untuk keluar dari perangkap yang akan menyengsarakan masyarakat di masa depan, misalnya isu-isu perubahan iklim dan pemanasan global yang mempengaruhi daya dukung lingkungan.

Di luar kelima kata kunci yang sering muncul di atas, terdapat beberapa kata kunci lain yang menjadi perhatian banyak penulis yakni *technology*, *gender*, *education*, *policy*, *governance* dan *poverty*. *Technology* menjadi kata kunci lain yang cukup banyak dibahas karena dimensi ketersediaan, keterjangkauan, dan penggunaannya sering dihubungkan dengan perbedaan antar kelompok untuk menguasainya. Sedangkan, kata kunci "*gender*" juga menonjol dalam literatur terkait. Hal ini mencerminkan kebutuhan untuk menggali dampak inovasi terhadap kesetaraan gender, baik dalam akses terhadap peluang ekonomi maupun partisipasi dalam proses inovasi itu sendiri. Peningkatan kesadaran terhadap peran gender dalam konteks inovasi dan ketidaksetaraan menjadi landasan penting dalam merumuskan kebijakan yang lebih inklusif. Kata kunci lain adalah "*education*". Pendidikan muncul sebagai isu kunci menunjukkan bahwa literatur terkait inovasi dan ketidaksetaraan secara aktif mengeksplorasi bagaimana inovasi dapat memengaruhi akses dan kualitas pendidikan. Kesadaran akan peran pendidikan sebagai instrumen untuk mengurangi ketidaksetaraan dalam masyarakat menjadi fokus penting dalam penelitian ini. Topik yang

justro tidak terlalu banyak diperbincangkan di dalam publikasi ilmiah adalah “*policy*”. Perhatian terhadap isu inovasi yang dikaitkan dengan *policy* jika menyimak dari tulisan yang muncul kebanyakan dikaitkan dengan sektor-sektor penting yang menjadi kebutuhan publik. Masih sedikit tulisan yang mengkaji bagaimana aspek-aspek dalam *public policy* dikupas dari sisi inovasi untuk mendorong peningkatan kualitas kebijakan. Isu lain yang sesungguhnya menarik dan menjadi persyaratan berkembangnya kebijakan yang inovatif adalah “*governance*”. Banyak penulis sepakat bahwa syarat mutlak terwujudnya inovasi kebijakan terutama untuk mendorong *equality* adalah manakala terjadi *good governance* dalam pemerintahan. Terakhir, isu “*poverty*” juga mencuat sebagai salah satu perbincangan utama. Analisis ini mencerminkan kebutuhan untuk memahami bagaimana inovasi dapat digunakan sebagai alat untuk mengurangi tingkat kemiskinan dalam konteks ketidaksetaraan ekonomi. Dengan memahami dinamika antara inovasi dan kemiskinan, penelitian ini memberikan landasan yang kuat untuk pengembangan kebijakan yang berkelanjutan dalam mengatasi ketidaksetaraan sosial dan ekonomi.

Grafik 1: *Overlay Visualization* kata kunci yang muncul dalam publikasi *innovation and inequality*



Sumber: data diolah penulis

Jika merujuk pada *concern* isu yang ditulis dalam *innovation and equality* dari tahun ke tahun, maka berdasarkan *overlay visualization* di atas menunjukkan bahwa topik yang banyak muncul pada tahun-tahun terakhir adalah *pandemic COVID-19*, *gender*, dan *artificial intelligence*. Topik lain yang akhir-akhir ini menarik terkait dengan *innovation and equality* adalah dimensi yang masuk dalam *Sustainable Development Goals (SDGs)* khususnya kemiskinan, ketidaksetaraan, dan lingkungan. Semua penulis menunjukkan kecemasan sekaligus harapan agar inovasi kebijakan bisa mengantisipasi isu-isu penting dalam SDGs tersebut sehingga hal-hal negatif di masa depan tidak terjadi. Penelitian-penelitian ini membentuk dasar pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana inovasi dapat menjadi katalisator untuk mengatasi tantangan global dan mendorong menuju pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

*Hadirin yang saya hormati,*

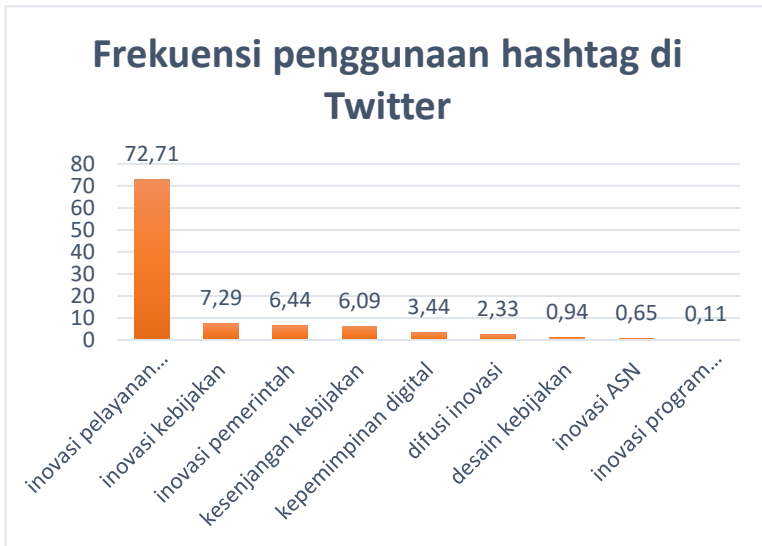
## **2. Inovasi Kebijakan dan *Inequality* dalam Media Sosial**

Dari data *crawling* yang dilakukan dengan durasi data antara bulan November 2019 sampai dengan Desember 2022 diperoleh data dengan distribusi persentase *hashtag* masing-masing adalah sebagai berikut (Grafik 2)<sup>6</sup>:

---

<sup>6</sup> Pada studi ini yang menjadi data penelitian adalah trending topik *tweet* masyarakat Indonesia di twitter. *Tweet* diambil sebanyak 4.595 *tweet* dengan *hashtag* *policy innovation*, *governance innovation*, *public service innovation*, *public sector innovation*, *diffusion innovation*, *political innovation*, *policy invention*, *public management innovation/reform*, *administration innovation/reform* yang masing-masing *hashtag* dikumpulkan dalam periode pengumpulan antara 19 November 2019 hingga Desember 2022 dari *Application Programming Interface (API)* dan *key token twitter*. Untuk dataset yang digunakan diambil melalui Twitter API dengan proses *crawling* menggunakan *tools orange datamining*. Hasil data *Crawling* dianalisa menjadi *cluster* serta di rekapitulasi sehingga menciptakan kata yang dominan muncul dari *tweet* (pendapat/komentar) tersebut. Kumulan *tweet* yang terkumpul ini kemudian dianalisis dengan *corpus* yang bisa dianggap sebagai populasi data.



Grafik 2: Frekuensi persentase penggunaan *hashtag* di Twitter

Sumber: data diolah penulis

*Hashtag* #InovasiPelayananPublik yang paling sering muncul dengan frekuensi sebesar 5.056. *Hashtag* tersebut paling banyak digunakan dalam diskusi inovasi. Hal ini menunjukkan bahwa inovasi pelayanan publik mendapat sorotan dan perhatian yang sangat besar dari masyarakat dalam dua tahun terakhir. Sebanyak 71,71 % *tweet* mendiskusikan “inovasi pelayanan publik” dalam perbincangan di Twitter. Adapun *hashtag* yang lain seperti #inovasikebijakan, #inovasipemerintah dan #kesenjangankebijakan hanya di bawah 10%. Adapun *hashtag* lain hanya diperbincangkan kurang dari 5% dari total 4.595 *tweet*.

Selain itu, terdapat 10 kata yang memiliki jumlah frekuensi terbesar yaitu inovasi, pelayanan, publik, kebijakan, kompetisi, penghargaan, pemerintah, kementerian, masyarakat dan digital. Selama kurun waktu 2 tahun terakhir, masyarakat memiliki perhatian yang cukup besar dalam hal Inovasi. Masyarakat di twitter juga sering memperbincangkan wacana terkait pelayanan, publik dan kebijakan. *Term Document Matrix* jika divisualisasikan menjadi sebuah tampilan *Word Cloud* sebagai berikut (Gambar 2):



*Hadirin yang saya muliakan,*

## **PERSPEKTIF TEORI**

### **1. Inovasi Kebijakan dan Inovasi Sektor Publik**

Studi inovasi berkembang sangat pesat dalam dua dekade terakhir yang dipicu oleh perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) khususnya teknologi digital. Keterkaitan inovasi dengan IPTEK pertama kali dipopulerkan oleh Joseph Schumpeter (1911, 1942) dengan mengenalkan lima pendekatan baru bagi seorang *entrepreneur* yakni: *new products, new production processes (technologies), new markets, new organizations, and new inputs*. Relasi ini juga tidak bisa dilepaskan ketika menjelaskan perkembangan inovasi kebijakan. Sebagai sebuah pilihan dalam kebijakan, para penerus Schumpeterian, melanjutkan analisisnya bahwa inovasi kebijakan bisa ditumbuhkan melalui tiga strategi yakni: pertama, strategi yang paling umum adalah dengan deregulasi, mengurangi transaksi biaya dan jumlah regulasi dan “*letting the market do its job*” (Baumol, 2002). Strategi kedua adalah sistem inovasi (Castells & Himanen, 2002), dengan mengembangkan model *governance* yang mencoba menganalisis lingkungan dan peran yang dimainkan oleh *principal players* (agen perubahan) dan bagaimana saluran komunikasi difusi dijalankan. Strategi ketiga adalah menetapkan tujuan yang spesifik misalnya melalui stimulasi sistem pendidikan untuk mendorong pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini. Secara umum, inovasi kebijakan adalah tentang kebaruan dan perubahan serta berhubungan dengan institusi, pasar, dan kondisi geografis (Lambooy, 2005).

Studi inovasi ini juga telah mendorong perubahan yang sangat pesat di berbagai bidang pemerintahan. Hampir semua aspek dalam kebijakan publik tidak bisa menghindari dari sentuhan inovasi. Tahapan dalam proses kebijakan (*agenda setting—formulasi—implementasi—evaluasi—perubahan kebijakan—terminasi kebijakan*), riset kebijakan yang menjadi penopang *evidence-based policy, leadership style*, teknik pengambilan keputusan, keterlibatan publik, kualitas program, penentuan *target group*, difusi, hingga teknik advokasi kebijakan, telah mengalami perkembangan pesat sebagai sebuah *science* dan sekaligus praktek kebijakan. Keterkaitan antara inovasi dan kebijakan yang erat

telah memunculkan konsep *policy innovation*. Bahkan beberapa pakar menyebut bahwa kajian dalam studi inovasi berasal dari studi kebijakan sebagai sebuah *science* (Martin, 2012; Radosevic, 2012).

Studi tentang inovasi pemerintahan sendiri sesungguhnya telah dimulai sejak tahun 1969 oleh Jack L. Walker yang melakukan studi terhadap 88 program pemerintah di USA. Konsep yang dikenalkan kala itu adalah *a state government innovation* yang didefinisikan sebagai sebuah program atau kebijakan yang baru bagi sebuah institusi pemerintah yang mengadopsinya (Berry & Berry, 1990; Glor, 2021). Dalam definisi ini ketika sebuah unit pemerintah mengadopsi sebuah kebijakan baru yang sudah diterapkan di unit pemerintahan yang lain, maka hal itu sudah bisa disebut inovasi kebijakan.

Di dalam beberapa literatur dijelaskan definisi dari *Policy Innovation* yang kadangkala bercampur dengan penggunaan konsep *Public Sector Innovation* (Brookfield Institute, 2018). Brookfield Institute kemudian menegaskan bahwa terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara kedua konsep tersebut. Inovasi sektor publik mencakup upaya struktural dan peningkatan kapasitas yang lebih luas untuk memungkinkan dan mempercepat inovasi dalam pemerintahan. Definisi ini antara lain mencakup integrasi teknologi dan layanan sektor publik yang baru. *Public sector innovation* antara lain dicirikan dengan struktur dan proses baru yang memungkinkan inovasi dalam pemerintahan, seperti pemerintahan terbuka dan pemerintahan digital. Inovasi kebijakan sektor publik umumnya merujuk pada pengembangan desain kebijakan baru dan *standard operating procedures* (SOP) baru yang diterapkan oleh organisasi publik untuk mengatasi beragam isu kebijakan publik (Rahman et al., 2020). Inovasi kebijakan sektor publik juga diasosiasikan dengan spirit reformasi seperti *New Public Management*, *e-government*, perubahan paradigma dari pemerintahan (*government*) ke tata kelola (*governance*) dan berkurangnya peran pemerintah dalam tata kehidupan masyarakat secara umum (Vries et al., 2015). Menurut Tönurist et al. (2017), proses ini ditengarai oleh perkembangan teknologi seperti penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, serta gagasan tata kelola yang berfokus pada pengguna jasa atau masyarakat. Karakteristik lain yang melekat adalah proses kolaborasi yang terbuka antar *stakeholders* yang berasal dari berbagai

organisasi (Bekkers & Tummers, 2018). Terwujud atau tidaknya inovasi kebijakan di sektor publik antara lain juga dipengaruhi oleh mekanisme formal seperti peraturan perundangan yang menuntut organisasi publik untuk melakukan inovasi (Clausen et al., 2019).

*Policy innovation* memiliki fokus pada proses pengembangan kebijakan dan inovasi instrumen yang dihasilkan. *Policy Innovation* antara lain dicirikan dengan proses, alat, dan praktik baru yang digunakan untuk perancangan dan pengembangan kebijakan yang menghasilkan penyelesaian masalah yang lebih baik terhadap isu-isu kompleks. Bloch & Bugge (2013) memaknai inovasi kebijakan sebagai konsep kebijakan baru yang disebabkan oleh perubahan kebijakan, program baru, atau sebuah reformasi besar. Inovasi dalam definisi ini adalah proses perubahan yang dilakukan secara sadar dan biasanya inovasi ini adalah perpaduan dengan perubahan bertahap yang dilakukan sebelumnya dan memiliki hasil serupa (Osborne & Brown, 2011).

*Innovation* dalam *policy* ini didefinisikan sebagai menerapkan wawasan, sumber daya, atau pendekatan baru yang bertujuan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat dibandingkan dengan cara konvensional dalam melakukan sesuatu. Lebih lanjut definisi *policy innovation* adalah tentang menciptakan kebijakan, peraturan baru, dan program serta layanan yang sangat bermanfaat dan menjadi proses pembelajaran untuk masyarakat. Hal ini mencakup metode inovatif untuk melibatkan masyarakat dalam pengembangan kebijakan, program dan layanan (misalnya melalui penganggaran partisipatif, *crowdsourcing*); metode inovatif untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan, program dan layanan (misalnya melalui pembentukan perilaku, metode desain layanan); dan metode pendanaan inovatif (misalnya melalui keuangan yang bersumber dari pembiayaan sosial, *public-private partnership*) (Brookfield Institute, 2018).

Beberapa pakar lain menjelaskan bahwa konsep *policy innovation* merujuk pada konteks inovasi yang luas di beragam sektor, termasuk sektor publik. Inovasi kebijakan melibatkan proses yang mempertimbangkan *feedback* dari para pengguna layanan dalam proses perancangan kebijakan publik (Capano & Galanti, 2021). Kedua penulis menegaskan bahwa dalam *policy innovation* mempertimbangkan pola tindakan yang berfokus pada promosi untuk inovasi, mbingkai

masalah dalam konteks tertentu, mengembangkan solusi, membangun koalisi dukungan, dan mencari peluang. Hal ini umumnya dikaitkan dengan kewirausahaan sektor publik yang dijabarkan sebagai inisiatif kebijakan publik yang inovatif dalam rangka menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk mendorong tindakan kreatif sebagai respons dan antisipasi terhadap kondisi yang serba tidak pasti (Link, 2022). Inovasi kebijakan juga berkenaan dengan kepemimpinan dan promosi pendekatan kolaboratif sektor publik dalam rangka mendorong terciptanya budaya inovasi (Ṭigānaṣu et al., 2019).

Menurut definisi dari Brookfield Institute, konsep *Public Sector Innovation* lebih luas dari *Policy innovation*. Namun, tulisan ini tidak terlalu mempermasalahkan perbedaan keduanya karena bagi penulis yang penting adalah lokus inovasi kebijakan ini berada pada apa yang dilakukan pemerintah untuk merespons persoalan publik. Hal ini sesuai dengan lokus kebijakan yang berada pada ranah publik.

Menyimak kembali sejarah pada abad pertengahan, Parsons (2006) menjelaskan bahwa karya-karya besar Marlowe dan Barabas yang hidup sezaman dengan Shakespeare telah menggunakan kata “policy” secara sederhana dalam karya dramanya. Salah satu makna *policy* yang cukup dikenal kala itu adalah perencanaan yang cerdas (*scheming*). Lebih jauh Parsons (2006) menjelaskan bahwa *policy* yang didefinisikan sebagai *scheming* tadi adalah upaya perekayasa untuk menciptakan atau merekayasa cerita yang logis untuk mengamankan tujuannya sehingga ia tidak bisa lepas dari politik perekayasa sebagai penguasa. Kendati demikian, *policy* menurut Lasswell (1951) seharusnya dibebaskan dari konotasi yang sering muncul secara politis yakni keberpihakan dan korupsi. Sebaliknya, Parsons (2006) menegaskan bahwa kebijakan tidak bisa dilepaskan dari politik karena ia menjadi ekspresi rasionalitas politik, yakni kebijakan menjelaskan apa yang sedang terjadi dan apa yang seharusnya dilakukan. Dengan kata lain, kebijakan adalah seperangkat tindakan atau rencana yang mengandung tujuan politik. *Value* politik menjadi kental dalam *policy* sehingga Thomas Dye mendefinisikan *policy* sebagai apa yang dilakukan dan tidak dilakukan oleh pemerintah (Dye, 2017) untuk mengatasi masalah publik tertentu.

*Hadirin yang berbahagia,*

## **2. Hubungan antara Inovasi Kebijakan dan *Inequality***

Para peneliti memiliki kesimpulan yang berbeda bahkan kontradiktif tentang hubungan antara ketimpangan dan inovasi kebijakan. Inovasi dapat berkontribusi pada peningkatan ketimpangan jika hasil inovasi kebijakan tidak didistribusikan secara merata (Phiri et al., 2016). Hal ini karena seiring dengan inovasi kebijakan teknologi membutuhkan penguasaan *skill* yang lebih tinggi sehingga meningkatkan pendapatan bagi sebagian masyarakat yang mampu memenuhi ketrampilan tersebut, namun tidak bagi sebagian lain yang tidak mampu memenuhinya (Santos et al., 2017). Sebaliknya, Shahabadi et al. (2017) justru berpendapat bahwa inovasi dapat menurunkan ketimpangan. Pernyataan ini didukung dengan argumen bahwa inovasi dapat mengarahkan pembangunan industri dan teknologi baru untuk meningkatkan produktivitas dan kesempatan kerja. Dampaknya adalah mendorong gaji yang lebih tinggi dan distribusi pendapatan yang lebih merata. Hasil penelitian yang saling bertolak belakang tersebut menyimpulkan bahwa inovasi dapat meningkatkan atau menurunkan ketimpangan ekonomi, bergantung pada pemerataan penguasaan keterampilan oleh masyarakat. Dengan demikian, penting untuk mempertimbangkan konteks sosial, ekonomi, dan politik secara menyeluruh sehingga risiko peningkatan ketimpangan akibat adanya inovasi dapat dimitigasi secara tepat.

Selanjutnya, penelitian Phiri et al. (2016) menyimpulkan bahwa di satu sisi, tingkat ketimpangan yang tinggi dapat menghambat inovasi seiring terbatasnya akses terhadap kesempatan dan sumber daya bagi kelompok yang terpinggirkan. Dengan demikian, penting bagi pemerintah untuk mengurangi disparitas pendapatan untuk mendorong terwujudnya masyarakat yang lebih inovatif (Hatipoglu, 2012). Namun di sisi lain, ketimpangan juga dapat menciptakan dorongan bagi para individu tersebut untuk membangun solusi dan teknologi baru untuk mengatasi beragam tantangan sosial (Phiri et al., 2016). Oleh karena itu, berangkat dari pemahaman bahwa level inovasi dapat memiliki dampak yang berlainan terhadap tingkat ketimpangan, pemerintah perlu

memperhatikan peningkatan pengetahuan dan akses masyarakat terhadap fasilitas yang mendorong inovasi.

Studi hubungan antara inovasi dengan *equality* biasanya berkembang dalam studi ekonomi dan ketenakerjaan. Terdapat empat premis utama yang berkembang yakni: **Pertama**, bahwa pekerja dengan keterampilan yang lebih tinggi cenderung mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi di daerah dengan inovasi yang lebih tinggi. Studi yang dilakukan oleh Echeverri-Carrol & Ayala (2009), dan Liu & Lawell (2015) menemukan bahwa pekerja dengan ketrampilan tinggi yang bekerja di kota yang iklimnya inovatif sering kali mendapatkan upah yang lebih tinggi ketimbang di kota yang tidak inovatif. **Kedua**, *sharing* pengetahuan memungkinkan pekerja yang memiliki keterampilan rendah untuk belajar dari pekerja berketrampilan tinggi dan meningkatkan produktivitas mereka (Glaeser, 1999). Kapasitas yang meningkat dari pekerja akan sangat kondusif untuk mendukung perkembangan inovasi teknologi, dan pada akhirnya mengurangi ketimpangan pendapatan. Kendati demikian terdapat kelompok yang membantah terhadap premis ini karena tidak semua pekerja dengan kapasitas rendah akan mampu mengakses pengetahuan yang inovatif untuk memperbaiki kapasitas mereka sehingga ketimpangan tetap akan terjadi. **Ketiga**, inovasi berhubungan dengan *equality* yakni melalui efek aglomerasi secara spasial. Menurut analisis dari pendekatan ini, bahwa inovasi akan menghasilkan keuntungan yang besar sehingga akan menarik tenaga kerja ke wilayah tersebut. Dengan kata lain, inovasi akan mendorong terjadinya urbanisasi. Namun demikian, beberapa pakar masih menyebut bahwa dampak urbanisasi terhadap *equality* masih ambigu (Liu & Lawell, 2015). **Keempat**, bahwa inovasi melalui kemajuan teknologi dapat mengubah pembagian lapangan kerja dan upah untuk kelompok keterampilan yang berbeda (Liu & Lawell, 2015). Menurut konsep *disruptive* dalam inovasi, teknologi baru akan menggantikan jenis lapangan kerja yang masuk kategori ketrampilan rendah dan selanjutnya akan mengurangi *income* mereka. Sebaliknya, teknologi yang *disruptive* akan mendorong kemunculan tenaga kerja dengan ketrampilan tinggi dan meningkatkan *income* mereka. Dengan demikian, inovasi bisa menciptakan *trade-off* di antara kelompok pekerja, satu sisi ada yang dirugikan dan sisi lain ada yang diuntungkan.



Dalam perspektif kebijakan, inovasi kebijakan memiliki relasi yang kuat terhadap *inequality*. Kebijakan adalah persoalan memilih nilai terbaik dengan *resources* yang tersedia untuk mendorong terjadinya perubahan sosial ke arah yang lebih baik. Ketika kebijakan diregulasikan, maka ia memiliki sifat pemandatan pada semua *stakeholders* yang harus mengimplementasikan dan *target groups* sebagai kelompok *beneficiaries*. Dengan ciri demikian, *policy* sangat bergantung pada karakter rezim yang berkuasa dan sangat *value loaded*, pada kapasitas dan komitmen pelaksananya, dan bagaimana respons publik terhadapnya. Faktor siapa pembuat kebijakan dengan berbagai kepentingan yang menghinggapinya pada akhirnya akan menentukan bagaimana alokasi *resources* dan arah kebijakan inovatif akan menghasilkan ketimpangan atau tidak. Mereka yang menjadi pelaksana kebijakan turut mewarnai bagaimana target-target kebijakan inovatif lebih memenuhi standar *value* mereka sebagai pelaksana ketimbang kepentingan publik. Logika efisien, efektif dan ekonomis dalam pelaksanaan tugas birokrasi hingga saat ini masih menjadi primadona aparatur pemerintah dalam mengukur kinerjanya. Hal ini sering kali mengabaikan aspek pemerataan *resources* karena ia sering kali berbeda jalan dengan logika pemenuhan kinerja birokrasi. Terakhir, faktor respons publik turut menentukan inovasi kebijakan dan sangat bergantung pada kapasitas dan kemampuan mengakses inovasi kebijakan tersebut. Perbedaan tersebut akan menghasilkan tingkat *equality* yang berbeda di antara publik yang menjadi target inovasi kebijakan tersebut.

Secara teknis, mengikuti pendapat Brookfield Institute (2018) terdapat spektrum yang membagi bagaimana inovasi kebijakan dikembangkan. Secara vertikal, spektrum tersebut menyeberang dari pendekatan *participatory* ke pendekatan *expertise*. Secara horizontal, dari pendekatan *public-facing (service)* ke *government-facing (policy)*. Pada *cluster participatory* dan orientasi *service*, terdapat pendekatan *open policy*, dan *design for policy and service*. *Open policy* dimaksudkan untuk mendekatkan publik dalam perumusan kebijakan dan sekaligus mendekatkan pemerintah pada kebutuhan masyarakat. Pada era sekarang, *open policy* sangat terbantu dengan adanya perkembangan inovasi teknologi digital yang masif. Alat yang dipakai umumnya adalah *e-govt, open data, big data analytics*. *Design for policy and*

*service*, keduanya berfokus pada warganegara dalam perumusan kebijakan. Keduanya berorientasi pada masa depan yang baru dan mengandalkan kolaborasi antara unsur di dalam dan luar pemerintah. Alat yang digunakan misalnya *empathy*, *ethnography*, *collaboration*, *journey mapping*. Sementara itu, pada *cluster policy* dengan *participatory* terdapat pendekatan *systemic design*. Menurut pendekatan ini para praktisi kebijakan diberikan keleluasaan untuk memahami *policy stakeholders mapping* dan membantu mencari celah-celah dalam mengembangkan kebijakan inovatif. Alat yang digunakan misalnya *conceptual mapping*, *geographic mapping*. Pada *cluster policy and expertise* terdapat *strategic foresight*. Pendekatan ini menekankan peran analis kebijakan kepada *policy maker* untuk beradaptasi dan mendekati pada visi kebijakan yang strategis di masa depan. Alat yang biasa dipakai misalnya *trend analysis*, *scenario planning*. Terakhir, pada *cluster service and expertise* menawarkan pendekatan *experimental policy* dan *behavioral insights*. Pada prinsipnya pendekatan yang banyak diadopsi dari teori perilaku ekonomi dan psikologi ini menempatkan manusia sebagai agen utama dalam *decision making*. Namun pendekatan ini menolak manusia sebagai agen yang berpikir rasional. Tawarannya lebih berupaya bagaimana mengembangkan perilaku kebijakan inovatif dan terserap dalam desain program dan kegiatannya. Untuk memenuhi hal tersebut antara lain studi eksperimen kebijakan, *prototyping*, dan *labs* banyak dikembangkan.

*Hadirin yang saya banggakan,*

### **3. Inovasi Kebijakan dan Pengaruhnya Terhadap *Inequality* di Beberapa Negara**

Studi yang dilakukan oleh Aghion, et al. (2019) di AS menyimpulkan adanya tiga pola hubungan antara inovasi kebijakan dengan ketimpangan pendapatan tertinggi. Pertama, studi menemukan korelasi positif dan signifikan antara inovasi dan ketimpangan pendapatan tertinggi. Inovasi dan ukuran ketimpangan yang luas tidak berkorelasi secara signifikan, dan bahwa ketimpangan pendapatan tertinggi tidak berkorelasi dengan inovasi yang sangat tertinggal. Kedua, studi ini berargumentasi bahwa korelasi ini setidaknya sebagian mencerminkan

efek kausal dari inovasi terhadap pembagian pendapatan tertinggi. Ketiga, studi juga menunjukkan bahwa inovasi berhubungan positif dengan mobilitas sosial. Di negara maju seperti Amerika, inovasi tentu saja merupakan salah satu faktor pendorong ekonomi. Aghion memberi contoh, dalam daftar individu terkaya per negara bagian AS yang disusun oleh Majalah Forbes menemukan bahwa 11 dari 50 orang terdaftar sebagai penemu paten di AS. Hal ini menunjukkan bahwa mereka memperoleh pendapatan tinggi dari waktu ke waktu karena kemampuan inovatifnya. Lebih penting lagi, antara hak paten dengan ketimpangan pendapatan tertinggi di AS dan negara maju lainnya telah mengikuti evolusi yang sifatnya paralel (Aghion, et al., 2019).

Kasus di Jerman, ketimpangan yang menonjol adalah ketidakmerataan pendapatan yang semakin meningkat sejak tiga dekade terakhir (Kitzmüller et al., 2021). Penyumbang utama ketimpangan pendapatan di Jerman adalah perubahan teknologi. Secara teori, perubahan teknologi akan mengurangi biaya otomatisasi rutin yang dilakukan pekerja. Di satu sisi terjadi penurunan lapangan kerja pada pekerjaan dengan ketrampilan menengah ke bawah, dan di sisi lain meningkatkan lapangan kerja pada pekerjaan berketerampilan tinggi yang mempengaruhi upah kerja. Pada saat yang sama, adopsi teknologi juga berkembang sebagai akibat pandemi COVID-19. Hal ini meningkatkan biaya non-otomatisasi terutama di bidang manufaktur yang kemudian berlanjut dengan kemajuan *Artificial Intelligence* dan robotika. Untuk mengatasi hal tersebut, usulan kebijakan yang saat ini diajukan oleh partai penguasa sebagian besar berfokus pada tipe kebijakan *redistributive* yakni memberikan kompensasi kepada ‘yang dirugikan’ dalam perubahan struktur ekonomi. Pembuat kebijakan perlu menjadikan peningkatan pendapatan pasar sebagai topik sentral dalam perdebatan mengenai masa depan dunia kerja. Lebih lanjut, Kitzmüller et al. (2021) menyarankan perubahan teknologi ke arah yang lebih ramah lapangan kerja yakni dengan memberi hak dalam proses partisipatif pekerja dalam pengambilan keputusan teknologi. Hal ini bisa dilakukan dengan mendorong ruang inovasi bersubdisi yakni manajer dan pekerja bersama-sama mengeksplorasi, mengembangkan, dan menguji berbagai pilihan teknologi yang menguntungkan mereka secara adil.

Artikel yang ditulis oleh De Palo et al. (2018) menjadi salah satu dari beberapa analisis tentang dampak keseluruhan inovasi terhadap ketimpangan pendapatan. Tulisan tersebut bahkan memberikan bukti empiris tentang hubungan antara inovasi dan ketimpangan pendapatan di antara negara-negara di Uni Eropa. De Palo et al. (2018) membuktikan bahwa inovasi kebijakan memiliki dampak signifikan dan beragam pada ketimpangan pendapatan. Hal ini karena inovasi di satu sisi bisa mengurangi dan di sisi lain meningkatkan kesenjangan antara kelompok berpendapatan tinggi dengan kelompok berpendapatan rendah dan menengah. Meskipun terdapat kepercayaan bahwa proses teknologi dan inovasi merugikan kelompok lemah, tulisan De Palo et al. (2018) justru menekankan bahwa investasi teknologi tinggi yang inovatif tidak menghambat distribusi perekonomian secara keseluruhan.

Studi evaluasi kebijakan yang dilakukan penulis di sebuah provinsi terhadap sebuah program yang dinilai paling inovatif yakni Program Keluarga Harapan (PKH) dalam pengentasan kemiskinan menghasilkan kesimpulan yang mengejutkan. Dari hasil perhitungan penulis dengan menggunakan metode *Instrumental Variable Quintile Treatment Effect*, ternyata program ini tidak mampu diserap secara efektif pada kelompok kuintil kemiskinan terbawah. Ketidakmampuan ini menyebabkan kelompok miskin terbawah justru semakin tertinggal di belakang<sup>7</sup>.

Studi kasus di China tentang inovasi dan ketimpangan yang ditulis oleh Liu & Lawell (2015) didasarkan pada pernyataan bahwa China memiliki investasi inovasi dan teknologi besar-besaran yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi di China. Namun di sisi lain,

---

<sup>7</sup> Program Keluarga Harapan adalah salah satu model pengentasan kemiskinan yang dinilai paling inovatif di banyak negara di dunia yakni *Conditional Cash Transfer* (CCT) karena kelompok miskin ditempatkan sebagai subjek, ketimbang objek, yang harus mampu keluar dari kemiskinannya sendiri. Sebagai sampel studi ini adalah di DIY dengan jumlah respondents adalah 3.933 keluarga dari kuintil termiskin yang tersebar di sembilan kecamatan yang dinyatakan sebagai wilayah termiskin di DIY. Hasil studi bisa dibaca di: **Hadna, A. H., & Askar, M. W.** 2022a. *The impact of conditional cash transfers on low-income individuals in Indonesia*. *Advances in Southeast Asian Studies*, 15(1), 23-41.

ternyata China juga menjadi salah satu negara yang memiliki ketimpangan pendapatan terbesar di dunia. Penelitian terdahulu menyimpulkan bahwa inovasi kebijakan dapat berdampak pada ketimpangan pendapatan karena dampaknya yang relevan terhadap premis keahlian pekerja (Lee, 2011; Lee & Rodríguez-pose, 2013; Liu & Lawell, 2015). Studi yang dilakukan oleh Liu & Lawell (2015) di China menemukan bahwa terdapat hubungan berbentuk U antara tingkat inovasi dan rasio pendapatan antara penduduk perkotaan dan pedesaan. Bentuk ini mengkonfirmasi bahwa meskipun inovasi menyebabkan kesetaraan pendapatan, ternyata investasi inovasi dalam jumlah besar dapat meningkatkan ketimpangan pendapatan. Studi Liu & Lawell ini juga menemukan bahwa tenaga kerja berketerampilan tinggi bisa mengurangi ketimpangan pendapatan, sedangkan laju industrialisasi dan urbanisasi justru meningkatkan ketimpangan pendapatan. Terakhir studi ini juga menyimpulkan bahwa terdapat hubungan terbalik berbentuk U antara inovasi dan proporsi penduduk yang berketerampilan tinggi.

Studi yang dilakukan oleh Law, et al. (2020) di dua puluh tiga negara maju antara 1990-2020 dengan menggunakan metode data panel menemukan bukti bahwa inovasi kebijakan berpengaruh signifikan terhadap semakin lebarnya ketimpangan pendapatan, terutama diukur dari jumlah paten. Studi Law membuktikan bahwa institusi dan sumber daya manusia memiliki korelasi negatif terhadap ketimpangan pendapatan di negara maju. Justru variabel lain yakni inflasi yang tinggi, globalisasi, dan pertumbuhan sektor keuangan cenderung meningkatkan atau memperburuk ketimpangan pendapatan. Studi ini juga mengkaji apakah globalisasi dan pertumbuhan sektor keuangan dapat berperan sebagai mediator dalam mempengaruhi hubungan antara inovasi dengan ketimpangan pendapatan. Hasilnya menunjukkan bahwa globalisasi dan pertumbuhan sektor keuangan justru berperan sebagai mediator yang memperburuk ketimpangan pendapatan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa efek marginal inovasi kebijakan memiliki hubungan positif dengan ketimpangan pendapatan melalui globalisasi dan pertumbuhan sektor keuangan.

Fakta adanya ketimpangan pendapatan akibat inovasi juga pernah dikaji oleh Singh & Mengesha (2023) di beberapa negara di Asia Pasifik. Kedua peneliti menggunakan metode uji akar unit *Augmented*

*Dickey-Fuller* dan *Phillips-Peron* pada deret waktu antara 1990 hingga 2020. Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat hubungan keseimbangan jangka panjang antara ketimpangan pendapatan dan inovasi yang dimediasi oleh sumber daya manusia. Dari limabelas negara Asia-Pasifik yang diteliti, studi ini menemukan bahwa semua negara mempunyai hubungan positif antara inovasi dan ketimpangan pendapatan, kecuali Jepang dan Vietnam. Temuan studi Singh & Mengesha (2023) tentang dampak inovasi terhadap meningkatnya ketimpangan pendapatan adalah akibat kebijakan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bersifat *top-down*. Selain itu, ketimpangan tersebut adalah dampak dari meningkatnya investasi sektor swasta di bidang teknologi, tetapi dengan memonopoli inovasi untuk mencari keuntungan sendiri. Monopoli ini menciptakan sistem inovasi berbasis ekonomi pasar yang cenderung mengecualikan kelompok masyarakat yang terpinggirkan. Strategi dalam menghadapi temuan ini, menurut kedua penulis adalah meninjau kembali sistem inovasi dengan menggunakan kombinasi *bottom-up* dan *top-down* agar berdampak pada pengurangan ketimpangan pendapatan.

*Hadirin yang saya hormati,*

#### **4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Inovasi Kebijakan**

Dari beberapa artikel yang diidentifikasi, penelitian dari Goyal (2021) menyoroti pentingnya memahami pengaruh dinamika pembuatan kebijakan terhadap kesuksesan kebijakan untuk inovasi berkelanjutan. Dalam studi tersebut, kesuksesan kebijakan dikonseptualisasikan menggunakan *Multiple Streams Framework* (MSF), dan hipotesis dikembangkan untuk menjelaskan hasil proses, program, dan politik berdasarkan keterkaitan antara masalah, kebijakan, dan aliran politik. Menggunakan kasus kebijakan energi surya di Gujarat, India, studi tersebut menunjukkan bahwa keterkaitan dinamis antara kebijakan dan politik memengaruhi kesuksesan proses, antara masalah dan kebijakan memengaruhi kesuksesan program, dan antara masalah dan politik memengaruhi kesuksesan politik (Goyal, 2021).

Artikel lain dari Glor (2021) yang membuat suatu sistem nomenklatur dan klasifikasi untuk unsur-unsur yang mendukung inovasi

kebijakan publik, terutama dalam konteks "*trailblazing*" (perintis) dan "*adoption*" (adopsi), yang berasal dari tinjauan literatur sistematis. Dengan kata lain, penelitian ini bertujuan untuk membuat kerangka konseptual atau sistem pengelompokan dan penamaan unsur-unsur yang menjadi faktor kunci dalam mendorong inovasi kebijakan publik, baik dalam hal perintis maupun adopsi. Nomenklatur merujuk pada pengidentifikasian unsur-unsur dan pemberian nama pada setiap unsur tersebut. Klasifikasi berkaitan dengan pengelompokan unsur-unsur tersebut ke dalam kategori atau klaster tertentu. Dengan menggunakan nomenklatur dan sistem klasifikasi ini, Glor berusaha memberikan pemahaman yang lebih baik tentang unsur-unsur apa yang dapat mendukung atau menghambat inovasi kebijakan publik, khususnya dalam konteks perintis dan adopsi.

Penelitian Glor tersebut menggunakan *Systematic Literature Review* (SLR) terhadap unsur-unsur pendukung inovasi kebijakan publik tahap perintis. Ditemukan 87 publikasi yang memenuhi kriteria dan 594 unsur pendukung. Hasil analisis menghasilkan suatu nomenklatur dan sistem klasifikasi yang terdiri dari 508 unsur unik, 28 unsur yang dikelompokkan, 5 faktor, dan 3 klaster. Temuan penelitian tersebut menyoroti dominasi unsur-unsur internal dalam konteks inovasi kebijakan publik. Faktor-faktor internal menjadi pusat perhatian utama, mungkin karena aksesibilitas informasinya yang lebih mudah. Meskipun klaster eksternal dan politik memiliki jumlah unsur yang lebih sedikit, penelitian belum dapat menyimpulkan secara pasti apakah hal ini mencerminkan kurangnya minat atau kendala dalam penelitian tersebut.

Temuan studi ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang paling penting mungkin berbeda untuk setiap klaster *antecedent* dalam tahap inovasi tertentu. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memahami varian variabel dan melihat apakah variabel tertentu lebih dominan pada tahap-tahap tertentu dalam proses inovasi kebijakan publik.

Penulis berpendapat bahwa praktik inovasi kebijakan dipengaruhi oleh beragam aspek seperti *governance, institution, political system, human resources, community participation, law and regulation, technology and infrastructure, leadership style, serta budget support.*

Aspek-aspek tersebut dan hubungannya dengan inovasi kebijakan dijelaskan sebagai berikut.

**Tatakelola.** Aspek *governance* (tata kelola) memiliki peran yang cukup signifikan dalam mempengaruhi inovasi kebijakan dan implementasinya dengan menyediakan kerangka kerja pengambilan keputusan, memastikan transparansi, dan mendorong kolaborasi dalam alokasi sumber daya alam (Fisman & Werker, 2011; Zhang, 2022; Tahir, et. al., 2019). Tata kelola kolaboratif telah diidentifikasi sebagai faktor penting dalam meningkatkan inovasi kebijakan publik (Sørensen & Torfing, 2011; Sumiyana, et al., 2022). Meski jaringan *governance* tidak selalu menghasilkan kolaborasi berkelanjutan, dan kolaborasi tidak selalu menghasilkan inovasi kebijakan (Sørensen & Torfing, 2011), tetapi hal ini dapat membantu menciptakan sistem yang lebih efisien, inklusif, tangguh, dan berkelanjutan, yang pada akhirnya menghasilkan produk kebijakan yang lebih baik secara keseluruhan (Fisman & Werker, 2011; Hassanudin, et al., 2023). Inovasi tata kelola harus inklusif karena sangat mungkin bahwa dalam prosesnya akan dibajak oleh sekelompok elite dan dilegitimasi sebagai tata kelola kerakyatan. Hal ini sangat membahayakan karena inovasi kebijakan yang dihasilkan akan bias pada kepentingan sekelompok elite tersebut.

**Kelembagaan.** Selanjutnya, aspek institusi juga memainkan peran yang penting dalam inovasi kebijakan. Penelitian oleh Alam et al. (2019) dan Hassanudin et.al (2023) menyimpulkan bahwa kualitas institusi politik dan ekonomi, termasuk efektivitas pemerintahan, supremasi hukum, dan kualitas keteraturan berdampak signifikan terhadap investasi di bidang R&D di negara-negara berkembang. Proses R&D ini pada gilirannya melahirkan opsi-opsi yang lebih banyak untuk diadaptasi dalam bentuk inovasi kebijakan. Temuan ini diperkuat oleh Kafka et al. (2021) yang menyatakan bahwa semakin tinggi kinerja institusi, semakin kuat pula dampaknya terhadap inovasi. Sementara itu, penelitian Lee & Law (2016) menyimpulkan bahwa kualitas institusi yang didukung dengan modal sosial yang kuat memiliki dampak secara langsung terhadap level inovasi. Secara umum dapat disimpulkan bahwa penguatan kualitas institusi adalah aspek penting dalam meningkatkan level inovasi terutama di negara-negara yang telah memiliki level inovasi yang tinggi. Sementara untuk negara-negara



dengan level inovasi yang masih rendah, alih-alih peningkatan level institusi, Lee & Law (2016) dan Ferdian et.al (2023) menekankan pentingnya penguatan modal sosial sebagai upaya untuk mendorong *policy innovation*. Pentingnya institusi juga ditegaskan oleh Acemoglu & Robinson (2012) yang menyebut dalam bukunya hingga 3x *institution..institution..institution* sebagai variabel penting yang menyebabkan sebuah negara mengalami kegagalan (*state failure*) atau tetap *survive*. Peringatan yang diberikan Acemoglu & Robinson (2012) menekankan bahwa model *extractive economic institution* jika tidak diimbangi dengan inovasi, maka peluang terjadinya *state failure* sangat besar. Inilah bahayanya jika institusi ekonomi sebuah negara dipaksa untuk selalu menumpuk kapital tanpa melakukan inovasi untuk menjaga sustainabilitas dan tata kelola yang akuntabel, maka tunggulah kehancurannya.

**Sistem Politik.** Kepemimpinan politik dan kolaborasi telah diidentifikasi sebagai pendorong utama inovasi kebijakan (Sørensen, 2016). Politik yang stabil menjadi prasyarat utama bagi pengembangan dan implementasi kebijakan yang inovatif. Dengan adanya suasana politik yang stabil, lembaga publik dapat memfokuskan energinya pada proses perumusan kebijakan tanpa terganggu oleh hiruk-pikuk politik yang tidak terduga dan justru dapat mengganggu perumusan dan implementasi kebijakan (Bhattacharya et al., 2017; Hadna, et al. 2017b). Selain itu, sistem politik yang terbuka terhadap partisipasi masyarakat juga dianggap sebagai salah satu fondasi penting bagi terwujudnya inovasi kebijakan seiring meningkatnya partisipasi masyarakat sebagai mitra aktif dalam pengambilan keputusan. Hal ini tidak terlepas dari konteks demokrasi yang matang, sehingga pemerintah lebih mungkin mendengarkan dan merespons kritik dan saran publik lalu menjadikannya bahan pertimbangan dalam perancangan inovasi kebijakan (Fung, 2015). Saya khawatir bahwa sistem politik yang sedang kita bangun justru berbalik ke belakang sebagaimana sebelum reformasi 1998. Jika betul ini terjadi, maka inovasi kebijakan hanya akan menjadi seperangkat instrumen kekuasaan yang definisi keberhasilannya berada dalam ranah penguasa. Jauh dari spirit inovasi kebijakan sebagai instrumen untuk mendorong terciptanya kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

**Sumberdaya Manusia.** Penelitian Subramaniam & Youndt (2005) menunjukkan bahwa sumber daya manusia memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan inovasi. Staf yang memiliki keterampilan, pengetahuan, dan keahlian dalam mengidentifikasi isu-isu krusial dan menganalisis kebijakan dapat berkontribusi secara substansial dalam merancang solusi inovatif, seiring eratnya hubungan antara inovasi dan *intellectual capital* (Kianto, et al., 2017). Berikutnya, keterlibatan SDM secara kolektif dalam diskusi dan proses pengambilan keputusan juga memiliki dampak signifikan dalam inovasi kebijakan (Kusmargono, et al., 2023). Partisipasi SDM yang berpengetahuan secara aktif dalam merancang, mengembangkan, dan mereview kebijakan dapat menjaring beragam perspektif, meningkatkan legitimasi kebijakan, dan merangsang ide-ide baru (Xiao & Cai, 2019). Seiring dengan proses tersebut, budaya organisasi yang memfasilitasi kreativitas dan eksperimen oleh SDM juga turut memperkuat lanskap inovasi kebijakan (Tian et al., 2018). Dengan demikian, fungsi SDM dalam mendukung inovasi kebijakan tidak sebatas tentang penyediaan tenaga kerja, tapi juga peran strategisnya dalam membentuk budaya dan lingkungan kerja yang inovatif.

**Partisipasi Masyarakat.** Partisipasi masyarakat adalah aspek penting pada hampir seluruh proses kebijakan, mengingat kebijakan secara umum adalah upaya untuk mengatasi persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Proses penyusunan kebijakan dapat menjadi langkah strategis untuk menghindari adanya rasa curiga yakni dengan memberi pengakuan terhadap identitas masyarakat yang bersifat khusus, lokal, dan kontekstual sebagai unsur tak terpisahkan dari sebuah rancangan inovasi (Dietrich & Schibeci, 2003; Setyawan, et al., 2023). Partisipasi masyarakat juga dapat meningkatkan adopsi atas sebuah inovasi kebijakan seiring perasaan yang timbul bahwa inovasi kebijakan tersebut sesuai dengan kebutuhan dan potensi mereka (Pratama, 2019). Berikutnya dalam tahapan implementasi, Suryanef et al. (2019) menegaskan bahwa keberhasilan penerapan kebijakan inovatif sangat dipengaruhi oleh antusiasme masyarakat untuk terlibat secara aktif, bahkan menyampaikan kritik sebagai bentuk partisipasi konstruktif. Penyampaian kritik ini menjadi pemicu terjadinya interaksi dua arah antara pengambil kebijakan dengan masyarakat, sehingga tercipta

lingkungan yang mendukung pertukaran gagasan dan pemahaman bersama. Proses interaktif ini dapat memperkuat inovasi kebijakan dan membantu mewujudkan perubahan sosial (Maslin-Ostrowski et al., 2017; Harsono, et.al., 2023).

**Peraturan perundangan.** Peraturan perundang-undangan dapat mendukung proses inovasi melalui penyediaan kerangka hukum yang akurat, pengadaan inovasi, dan pembagian risiko R&D dalam rangka mewujudkan potensi kolektif dan kolaboratif menuju ekosistem inovasi yang berkelanjutan (Costa & Matias, 2020). Peraturan perundangan memiliki dua fungsi, di satu sisi adalah mendorong terjadinya inovasi, dan di sisi lain juga melindungi masyarakat dari konsekuensi yang tidak diinginkan dari inovasi teknologi (Weimer et al., 2017). Dalam tataran praktik, penelitian Ding et al. (2022) membuktikan bahwa regulasi lingkungan cenderung memiliki dampak positif terhadap level inovasi sebuah perusahaan, terutama yang memiliki pasar di negara maju. Regulasi yang membatasi penggunaan bahan yang berbahaya bagi manusia dan kesehatan mampu merangsang perusahaan untuk menemukan dan mengimplementasikan beragam inovasi untuk mengurangi emisi dan penggunaan material yang berbahaya (Ludwig, 2019). Sementara itu dari aspek kelembagaan, regulasi yang tepat terbukti mampu mempengaruhi kemampuan sebuah institusi untuk memaksimalkan daya tahan dalam proses pembelajaran dan reformasi kebijakan (Bell & Mallinson, 2021; Tahir, et. al., 2019). Studi yang dilakukan penulis terhadap 2.867 Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) menemukan bahwa kompleksitas regulasi sering membuat posisi dilematik PPAT sebagai *street-level bureaucrats* dalam melaksanakan tugasnya. Saya khawatir bahwa dengan regulasi yang sangat kaku justru menciptakan upaya untuk “mencari celah-celah kelemahan” regulasi tersebut sehingga mendorong terjadinya penyimpangan dari regulasi tersebut. Pada studi yang dilakukan penulis terhadap PPAT tersebut penulis menyarankan untuk memberikan diskresi kepada PPAT dalam menjalankan tugas. Diskresi ini bisa tetap dalam kontrol pemerintah jika didukung dengan layanan berbasis digital yang terpadu<sup>8</sup>. Selain itu,

---

<sup>8</sup> Survey ini dilakukan terhadap 2.867 responden PPAT di 50 kabupaten/kota yang dipilih secara random dari 10 provinsi di Indonesia pada tahun 2020/2021. Selain dengan kuesioner, studi ini juga melakukan wawancara secara mendalam terhadap

riset kecil yang dilakukan penulis terhadap pejabat birokrasi di sebuah kabupaten di Provinsi Riau menegaskan bahwa faktor memperbaiki regulasi di sektor publik yang masih carut marut adalah faktor penting untuk mendorong inovasi berjalan efektif<sup>9</sup>.

**Teknologi dan infrastruktur.** Perkembangan teknologi dan infrastruktur mampu memberikan dukungan untuk berkembangnya inovasi kebijakan di beragam sektor. Hal ini berhubungan dengan kemampuan teknologi dan infrastruktur untuk mempermudah implementasi, pemantauan, dan monitoring kebijakan. Penelitian yang dilakukan oleh Abbaszadeh et al. (2019) mengidentifikasi bahwa perkembangan teknologi memungkinkan pengumpulan data yang lebih besar dan cepat melalui ketersediaan infrastruktur digital seperti sensor, *Internet of Things (IoT)*, maupun pemanfaatan platform digital. Data tersebut kemudian diproses sebagai bahan analisis kebijakan yang lebih mendalam. Selanjutnya, pemanfaatan teknologi dan infrastruktur digital juga mampu meningkatkan akses dan keterbukaan informasi publik, bahkan pengambilan keputusan secara *real time* (Manzoor, 2016). Dengan demikian, masyarakat dapat mengakses data publik dengan lebih mudah, sehingga memungkinkan perumusan dan implementasi kebijakan yang lebih transparan dan partisipatif (Christodoulou et al., 2018). Adopsi teknologi dan infrastruktur yang tepat juga memungkinkan organisasi publik untuk menerapkan *e-government* dan *e-participation* yang berfungsi untuk memfasilitasi interaksi yang bermakna antara pemerintah dan masyarakat secara digital, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan responsivitas pelayanan publik (Karakiza, 2015; Hadna, et al., 2022).

---

sejumlah PPAT dan pejabat terkait. Hasil studi ini bisa dibaca di: **Hadna, A.H.**, Listyaningsih, U., Ihwanudin, I., 2022c. *To What Extent Street-Level Bureaucrats Used Their Discretionary Power During the COVID-19 Pandemic in Indonesia*. International Journal of Public Sector Management. Vol.35, No.7, pp. 806-820.

<sup>9</sup> Studi ini dilakukan dengan menyebar kuesioner menggunakan google-form terhadap 187 pejabat eselon II dan eselon IIIa dan IIIb di Kabupaten Kampar pada akhir tahun 2023. Responden yang mengisi kuesioner adalah sebanyak 142 orang. Selain faktor regulasi, responden juga menyoroti perlunya memperbaiki tatakelola administrasi pemerintahan dan meningkatkan kapasitas SDM aparatur birokrasi untuk mendorong inovasi.

**Gaya kepemimpinan.** Arah kebijakan dan semangat inovasi salah satunya sangat dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan *transformational* dan *agile* yang inovatif (Hadna, 2022<sup>10</sup>; Adhikersa, et al. 2022; Kusmargono, 2023). Kepemimpinan inovatif mengacu pada sikap dan tindakan pemimpin yang menumbuhkan dan mempromosikan kreativitas dan inovasi dalam suatu organisasi (Khalili, 2017). Mereka memiliki kemampuan untuk memotivasi anggota tim, berani mengambil risiko, mempromosikan budaya eksperimen dan pembelajaran, mendorong kolaborasi dan berbagi pengetahuan, serta menyediakan sumber daya dan dukungan untuk proyek inovatif (Termeer & Nooteboom, 2014; Sulaiman, et al, 2023). Mereka juga mampu mengenali risiko dan ancaman dari kondisi terkini kemudian mengambil langkah antisipatif untuk mencegah dampak negatif di masa depan (Şen & Eren, 2012). Dengan mengadopsi gaya kepemimpinan inovatif, seorang pemimpin dapat menciptakan lingkungan yang mendukung ide baru untuk meningkatkan kualitas kebijakan publik. Dalam konteks ini, pemimpin berfokus pada solusi dan terbuka terhadap perubahan yang menjadi kunci untuk memicu keberhasilan inovasi kebijakan (Sumiyana, et al., 2022). Sayangnya, banyak pemimpin publik kita saat ini tidak memiliki karakter sebagai *entrepreneur* yang memiliki gaya *visionary leadership* dan berani menjadi *risk taker*. Lebih banyak gaya pemimpin publik saat ini lebih menyerupai seorang *administrator* ketimbang *leader*. Kondisi ini akan menghambat inovasi kebijakan berkembang di sektor publik. Faktor penghambat lain adalah manakala pemimpin tidak memiliki itikad moral dan etika yang baik karena inovasi akan diterjemahkan ke dalam makna yang pemimpin itu sendiri pahami dan pasti sangat bias dengan kepentingannya sendiri pula.

---

<sup>10</sup> Studi ini dilakukan di DIY terhadap 67 pejabat birokrasi eselon II di provinsi dan kabupaten/kota. Sedangkan 111 respondents berasal dari DPRD provinsi maupun kabupaten/kota yang berasal dari unsur pimpinan maupun anggota. Hasil studi ini bisa dibaca di: **Hadna, A.H.** 2022d. *An Exploratory Study of the Determinants of Decision-Making Process of Local Government During the COVID-19 Pandemic in Indonesia*. Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review. 7 (3). pp. 293-313.

**Dukungan anggaran.** Alokasi anggaran yang strategis dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan, implementasi, dan evaluasi inovasi kebijakan. Penelitian Head (2016) menunjukkan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk investasi infrastruktur teknologi yang mendukung inovasi seperti pengembangan sistem informasi, platform digital, dan alat analisis data memungkinkan lembaga publik untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mendistribusikan informasi dengan lebih efisien dalam rangka mendukung proses pengambilan keputusan berbasis bukti. Selanjutnya, *budget support* juga memungkinkan pemerintah mengalokasikan dana untuk penelitian dan pengembangan dalam rangka mengidentifikasi solusi inovatif untuk mengatasi berbagai masalah kebijakan yang rumit (Hourihan & Parkes, 2016). Sementara itu, Anessi-Pessina et al. (2020) menjelaskan bahwa *budget support* memberikan fleksibilitas kepada lembaga publik untuk merespons tantangan baru yang berpotensi muncul saat implementasi kebijakan. Melalui beragam keuntungan tersebut, *budget support* merupakan salah satu variabel yang penting bagi terwujudnya inovasi kebijakan yang berkelanjutan. *Budget support* memang sangat penting. Namun, studi yang dilakukan penulis terhadap dampak kebijakan inovatif bidang pendidikan yakni dana BOS mengingatkan bahwa pada titik tertentu jumlah dana BOS justru berkorelasi negatif terhadap kinerja sekolah. Penyebabnya adalah jika pengelolaan dana BOS tersebut tidak didukung oleh tata kelola, kepemimpinan dan institusi yang kuat<sup>11</sup>.

---

<sup>11</sup> Studi ini dilakukan di Jawa Tengah dan NTT dengan jumlah respondents siswa sekolah SD sebanyak 300 anak, dan SMP sebanyak 300 anak. Jumlah sekolah yang diteliti adalah 15 SD dan 15 SMP yang tersebar di kedua provinsi tersebut. Studi ini juga menggunakan teknik wawancara mendalam terhadap guru dan komite sekolah. Hasil studi bisa dibaca di: **Hadna, A.H.**, 2022e. *An Evaluation of the School Operational Assistance (BOS) Policy and Its Effect on Teacher Performance in Indonesia*. Malaysian Online Journal of Educational Management. Vol.10, Issue 2. p. 1-14. <http://mojem.um.edu.my>

*Hadirin yang berbahagia,*

## **PENUTUP**

Perhatian publik terhadap inovasi kebijakan dan pengaruhnya terhadap tingkat *equality* dalam masyarakat semakin lama semakin meningkat, khususnya yang ditulis di jurnal internasional. Inovasi bisa mendorong kesejahteraan meningkat, tetapi banyak tulisan yang memberi peringatan bahwa inovasi juga bisa mendorong *income inequality* lebih meningkat. Hal ini terbukti dari pengalaman di banyak negara yang menunjukkan kecenderungan peningkatan *inequality* tersebut. Kepedulian terhadap isu *inequality* ini umumnya selalu dikaitkan dengan perhitungan ekonomi dalam mengukur dampak dari inovasi kebijakan. Selain ekonomi, banyak penulis mengaitkan inovasi kebijakan dan *inequality* dengan aspek kesehatan terutama pada periode pandemi COVID-19 yang merebak di 2020-2022. Beberapa tulisan menarasikan adanya hasil positif dalam layanan kesehatan, tetapi terdapat pula narasi ketimpangan antar kelompok untuk mengakses layanan kesehatan, khususnya pada bagaimana layanan kesehatan murah dengan dukungan teknologi canggih. Kata kunci lain yang muncul dan tidak kalah menarik adalah dikaitkan dengan gender dan kepedulian terhadap tercapainya SDGs khususnya kemiskinan. Hasil berbeda diperoleh dari penelusuran persepsi publik Indonesia di media sosial. Sebagian besar publik menilai inovasi kebijakan selalu dikaitkan dengan pelayanan publik. Respons publik ini sangat lumrah karena mereka sangat membutuhkan layanan publik yang berkualitas secara merata di antara semua kelompok. Pemerintah sesungguhnya sedang melakukan inovasi secara masif pada hampir semua jenis layanan publik. Namun kritik masih sering dilayangkan terhadap kualitas pelayanan publik yang mereka peroleh. Isu keadilan dalam layanan publik nampaknya masih menjadi isu sensitif bagi sebagian besar masyarakat dalam menilai kinerja pemerintah.

Data empiris sebagaimana disimpulkan di atas relevan dengan analisis secara teoritis yang menjelaskan bahwa inovasi kebijakan bisa memiliki dua sisi mata pisau yang menghasilkan dampak berlawanan. Pada sisi positif, inovasi kebijakan mampu mendorong perubahan sosial yakni peningkatan kesejahteraan masyarakat, tetapi pada sisi

yang lain justru bisa menimbulkan dampak negatif dimana salah satunya adalah mendorong ketimpangan sosial ekonomi di antara kelompok dalam masyarakat. Dimensi inovasi kebijakan yang mempengaruhi level *equality* adalah pada pilihan *governance* (*democratic vs authoritarian*), *struktur* (*top-down vs bottom-up*), *regulation* (*rigid vs adaptive*), *policy process* (*inclusive vs exclusive, participatory vs technocratic*), *budget support* (*state-private-social finance*), *evidence source* (*research based vs common sense/intuitive*), *focus* (*problem-oriented/reactive vs vision-oriented/proactive*), *strategy* (*collaboration vs rivalry*), *institution* (*extractive vs sustainable*), *leadership* (*administrator vs entrepreneur*).

Pengalaman negara lain menunjukkan beberapa variabel kunci yang menjadi penyebab ketimpangan meskipun inovasi ditingkatkan. Faktor industrialisasi dan urbanisasi jika tidak diimbangi dengan kapasitas SDM yang memadai akan memicu ketimpangan. Demikian halnya faktor globalisasi dan pertumbuhan sektor keuangan jika tidak diimbangi dengan institusi dan *governance* yang kuat akan meningkatkan ketimpangan. Faktor monopoli ilmu pengetahuan dan teknologi, apalagi jika dilakukan secara *top-down* akan semakin memperparah ketimpangan. Dengan menggunakan pemikiran Rawl (Parsons, 2006) tentang keadilan dalam kebijakan publik, semestinya inovasi kebijakan harus mempertimbangkan model kebijakan *distributive* dan *redistributive* untuk menjamin proses yang *fairness* dan hasil inovasi kebijakan yang pro pada keadilan. Saya tidak sependapat jika inovasi kebijakan diserahkan sepenuhnya pada pasar. Sejarah di Indonesia yang hingga saat ini belum mampu menyelesaikan *inequality*, maka akan sangat berbahaya jika inovasi kebijakan hanya mempertimbangkan sepenuhnya aspek pasar. Oleh karena itu, sangat penting untuk memperdalam dan memperluas literasi publik tentang kebijakan sehingga publik tidak mudah ditipu oleh kebijakan siapa pun dari rezim yang berkuasa.

*Hadirin yang saya muliakan,*

Tibalah saatnya pada bagian akhir dari pidato pengukuhan ini saya berkesempatan mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah mengukir dan



mewarnai perjalanan hidup dan karier saya selama 25 tahun mengabdikan di Universitas Gadjah Mada ini.

Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor, Wakil Rektor, Senat Universitas, Dewan Guru Besar, tim penilai tingkat departemen, fakultas dan universitas yang telah menyetujui dan selanjutnya mengusulkan saya untuk menduduki jabatan sebagai Guru Besar bidang Kebijakan Publik.

Saya juga memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua guru-guru saya yang sudah mendahului kita di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan pencerahan ilmu, etika, dan ketaatan pada tugas semenjak awal saya masuk sebagai staf pengajar di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yakni beliau: Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MPA (alm), yang sudah banyak mengajarkan tentang penelitian di lapangan ketika awal-awal saya sebagai dosen; Prof. Dr. Moeljarto Tjokrowinoto (alm); Prof. Dr. Yahya Muhaimin (alm); Prof. Dr. Riswandha Imawan (alm); Prof. Dr. Afan Gaffar (alm); Prof. Dr. Cornelis Lay (alm); Prof. Dr. Nasikun (alm); Drs. Subaroto (alm); Drs. Sutarto (alm); Drs. Sedijono (alm); Drs. RI. Soetrisno (alm); Drs. Subakdi Susilowidagdo (alm); Drs. Sofwan Badri (alm); dan Drs. Made Pariata Westra, SH, SE (alm).

Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih atas bimbingan dari para guru saya yang sudah purna di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM yang telah banyak berjasa dalam menginspirasi dan mengembangkan keilmuan saya serta menyetujui usulan guru besar saya, yakni beliau yang sudah purna tugas: Prof. Dr. Sofian Effendi, MPIA, atas jasa beliau terutama ketika itu mengizinkan dan memfasilitasi studi saya ke Jerman; Prof. Dr. Muhadjir Darwin, MPA, yang tidak kenal lelah bersama-sama mengembangkan prodi multi disiplin MDKIK di SPS; Prof. Dr. Miftah Thoha, MPA; Prof. Dr. Warsito Utomo; Prof. Dr. Ichlasul Amal; Prof. Dr. Mohtar Mas'ood; Prof. Dr. Susetiawan, SU; Prof. Dr. Sunyoto Usman, MA; Prof. Dr. Partini, SU; Prof. Dr. Tadjoeddin Noer Effendi, MA. Demikian pula ucapan terima kasih kepada beliau Guru Besar di Senat Fakultas yang telah menyetujui pengusulan Guru Besar saya, yakni beliau: Prof. Dr. Wahyudi Kumorotomo, MPP; dan Prof. Dr. Yeremias T. Keban, MURP, yang kedua beliau telah bersedia meluangkan waktu untuk mereview

isi pidato ini ; Prof. Dr. Agus Pramusinto, MDA, yang banyak membantu selama studi di Jerman; Prof. Dr. Erwan Agus Purwanto, M.Si; Prof. Dr. Pratikno, M.Soc.Sc.; Prof. Dr. Purwo Santoso, MA; Prof. Dr. Haryanto, MA; Prof. Dr. Poppy Sulistyning Winanti, MPP, M.Sc.; Prof. Dr. Heru Nugroho, SU; Prof. Dr. Suharko, M.Si; Prof. Dr. Janianton Damanik, M.Si; Prof. Dr. Phil. Hermin Indah Wahyuni, M.Si; Prof. Dr. Ana Nadhya Abrar, MES; Prof. Dr. Nunung Prajarto, MA; serta seluruh Anggota Senat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM yang tidak bisa saya sebut satu-persatu.

Ucapan terima kasih saya juga sampaikan kepada ”Doktorvater” saya di Universitaet Duisburg-Essen yakni Prof. Dr. Dieter Grunow, dan Prof. Dr. Thomas Heberer. Merekalah yang dengan kearifan dan keseriusannya telah membimbing saya meraih gelar doktor di Jerman. Kolega lain yang tidak lupa saya ucapkan terima kasih adalah Prof. Benjamin White, Ph.D; Chris Manning, MA. Ph.D., Dr. Gerben Nooteboom; Dr. Edwin de Jong; Prof. Dr. Gunther Schulze; Prof. Dr. Terry Hall; dan Prof. Jian Bang Deng yang turut memberikan perspektif ilmu kependudukan pada ilmu kebijakan yang saya pelajari.

Ucapan terima kasih saya sampaikan juga kepada Dekanat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM yang telah menyetujui dan memfasilitasi pengusulan Guru Besar saya, yakni beliau: Dekan Bapak Dr. Wawan Mas’udi, MA; Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Dr. Poppy Sulistyning Winanti; Wakil Dekan Bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Kerja sama, dan Alumni, Dr. Fina Itriayati; Wakil Dekan Bidang Keuangan, Aset, dan Sumber daya Manusia, Dr. Nurhadi Susanto. Terima kasih juga kepada KKA Fisipol, Bp.Paminto Adhi, SE, M.Si dan staf tenaga kependidikan khususnya Bp. Uling Sumbogo, SIP. dan Bp. Paryanto, SIP.

Teruntuk ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya sampaikan kepada kawan-kawan staf pengajar selain yang sudah saya sebut sebelumnya di lingkungan Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik, yakni beliau: Dr. Subarsono, MA.; Dr. Subando Agus Margono, M.Si.; Dr. Yuyun Purbokusumo, M.Si; Dr. Ambar Widaningrum, MA; Dr. Samodra Wibawa, M.Sc.; Dr. Ratminto, M.Pol. Admin.; Dr. Ambar Teguh Sulistyani, M.Si.; Dr. Suropto, MPA; Dr. Ely Susanto, MBA; Dr. Nunuk Dwi Retnandari, M.Si.; Dr. Nurhadi

Susanto, SH, M.Hum.; I. Made Krisnajaya, M.Pol. Admin; Dr. Bevaola Kusumasari, M.Si.; Dr. Phil. Gabriel Lele, M.Si.; Dr. Ario Wicaksono, M.Si.; Dr. Puguh Prasetya Utomo, MPA; Dr. Media Wahyudi Askar, M.Sc.; Dr. Muchtar Habibi, MA; Dr. Indri Dwi Apriliyanti, MBA; Dr. Yuli Isnadi, MPA; Dr. Novi Paramita Dewi, MDP; Ag. Kustulasari 81, S.Pd., MA; Pradhikna Yunik Nurhayati, SIP, MPA.; Dr. Erda Rindrasih, S.Si., MURP.; Alvi Syahrina, ST, M.Sc. Tidak lupa juga terima kasih kepada tenaga kependidikan dan semua asisten Departemen MKP yakni: mbak Yuli. Mbak Ratna, mbak Tutik, mbak Iik, mbak Sagita, mbak Andiyani, mas Lutfi, mas Rizki, mbak Nimas, mbak Andin, mbak Audori, mbak Ndaru, mbak Vika, mas Bagus, mas Fakhrih, mas Fanani, mas Fauzi, mbak Erythrina.

Demikian pula ucapan terima kasih pada Guru Besar dan dosen lain di lingkungan UGM dan luar UGM yang sudah banyak menginspirasi dan membantu saya dalam mengembangkan studi multi disiplin yakni Prodi Magister dan Doktor Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan (MDKIK) di Sekolah Pasca Sarjana yakni beliau: Dekan SPS, ibu Prof. Dr. Ir. Siti Malkhamah, M.Sc; WD 1 SPS, Dr. Widyanto Dwi Nugroho, S.Hut., M.Agr.; WD 2 SPS, Dr. Techn. Khabib Mustofa, S.Si., M.Kom.; dan Prof. Dr. Ahmad Maryudi, M.Forest., sebagai partner kerja saya di Prodi MDKIK SPS; Prof. Dr. Wihana Kirana Jaya; Prof. Dr. Dato' Sri Tahir, MBA; Prof. Dr. Ir. Achmad Djunaedi, MURP; Prof. Dr. Ir. Panut Mulyono, M.Eng., D.Eng., IPU, ASEAN.Eng.; Prof. Dr. Todung Mulya Lubis, SH.; Prof. Dr. Djokosantoso Moeljono; Prof. Dr. Hikmahanto Juwana, SH, LL.M.; Prof. Dr. Ir. Ali Agus, DAA., DEA.; Prof. Dr. Setiadi, M.Si; Prof. Dr. Sukamdi, M.Sc.; Prof. Dr. Eduardus Tandelilin, MBA; Prof. Dr. Wakhid Slamet Ciptono, MBA, MPM; Prof. Dr. Ir. Agus Taufik Mulyono, MT., IPU.; Prof. Dr. Makarim Wibisono, MA-IS., MA; Prof. Dr. dr. Yodi Mahendradhata, M.Sc., FRSPH; Prof. Dr. Paulus Insap Santosa, M.Sc., IPU; Prof. Dr. Catur Sugiyanto, MA; Prof. Dr. rer.nat. Muh. Aris Marfai, S.Si., M.Sc., Prof. Dr. Sigit Riyanto, SH., LL.M; Prof. Dr. Irwan Abdullah; Prof. Dr. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc.; Prof. Dr. Lukito Edi Nugroho; Prof. Dr. M. Baiquni, MA; Prof. Dr. Djati Mardiatno, S.Si., M.Si.; Prof. Dr. Rijanta; Prof. Dr. Sri Rum Giyarsih, M.Si; Dr. Dina Ruslanjari; Prof. Dr. Armaidly Armawi; Prof. Dr. Samsubar Saleh; Prof. Dr.

Deendarlianto; Prof. Dr. Kwartarini Wahyu Yuniarti, M.Med.Sc.; Prof. Dr. Ir. Zaenal Bachruddin, M.Sc. IPU., ASEAN.Eng.; Dr. Pande Made Kutaneegara, M.Si; Dr. Dewi Haryani Susilastuti, MA; Dr. Hakimul Ikhwan, MA; Dr. Agus Joko Pitoyo, MA; Dr. Umi Listyaningsih; Dr. Abdur Rofi, M.Si.; Dr. Evita Hanie Pangaribowo, MIDEK; Dr. Sumiyana; Dr. Amirullah Setyahardi; Dr. Leo Indra Wardhana, M.Sc., CFP.; Dr. Akhmad Akbar Susanto, SE., M.Phil.; Dr. Elan Satriawan; Dr. I Wayan Nuka Lantara; Dr. Reni Rosari, MBA; Dr. Fitri Amalia, SE., M.Sc.; Dr. Eddy Junarsin, CFP.; Dr. Diah Retno Wulandari, MBA; Dr. I Made Andi Arsana; Dr. Ir. Dewanti, M.S.; Dr. Rahmat Hidayat, S.Psi., M.Sc.; Dr. Sumaryono, M.Si. Psikolog; Dr. Galang Lufityanto, M.Si.; Dr. Wenty Marina Minza, MA; Dr. Indrayanti, S.Psi., M.Si.; Dr. Nurhadi, S.Sos., M.Si.; Dr. Mulyadi, MPP.; Dr. Riza Noer Arfani, MA (alm); Dr. Dedy Permadi; Dr. Nanang Indra Kurniawan; Dr. M. Najib Azca; Dr. Dafri, MA; Dr. Hendrie Adji Kusworo; Dr. Nur Rachmat Yuliantoro, MA; Dr. Jangkung Handoyo Mulyo; Dr. Ir. R. Ahmad Romadhoni Surya Putra, S.Pt., M.Sc.; Dr. Ninik Darmi, SH., M.Hum.; Dr. Sri Wiyanti Eddyono, SH, LLM (HR); Dr. Friderica Widyasari Dewi, SE, MBA; Dr. Sri Nuryanti; Dr. H. Sugiyanto Semangun; Letjen TNI (Purn.) Dr. Tatang Sulaiman, S.Sos., M.Si.; Mayjen TNI (Purn.) Dr. Hassanudin, MM.; Mayjen. TNI. Dr. Heri Wiranto, MM, M.Tr (Han); Mayjen TNI. Lilik Sudaryani, M.Sc; Brigjen. TNI. Agus Setyawan, M.Sc; Brigjen. TNI. Heri Purwanto, M.Sc.; Laksamana Muda (Purn.) Dr. E. Estu Prabowo, M.Sc.; Marsekal Muda TNI. Benny Arfan, MMP, MMDS, MSS.; Marsekal Pertama (Purn.) Dr. Agus Purwo; Letkol.TNI. Dr. Subur Wahono; Dr. Ayu Sari Wulandari, MAF; Dr. Mohammad Sulthon Amien, MM; Dr. Suryantoro Waluyo, SH, MPM; Dr. Ir. Kuncoro Cahyo Aji, M.Si; Dr. Abdul Haris Achadi, SH, Dess; Dr. Anggi Rahajeng, M.Ec.

Penghargaan juga saya berikan kepada institusi pemerintah yang pernah kerja sama dengan kami yakni Bappenas, Kominfo, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kemenko PMK, Kemenkeu, Kemendagri, Kemendikbud, Kemendes PDT & Trans, Kemensos, Kemenkumham, dan KLHK. Demikian juga institusi pemerintah setingkat badan yakni BKKBN, TNP2K, dan Basarnas. Tak lupa penghargaan saya berikan kepada sejumlah pemerintah provinsi di

Indonesia seperti Pemerintah DIY dengan semua kabupaten dan kota di dalamnya, serta sejumlah provinsi di Jawa maupun luar Jawa yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Tidak ketinggalan pula pemerintah kabupaten di Indonesia yang jumlahnya puluhan yang tersebar di seluruh Indonesia yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Sementara itu, ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada lembaga donor dan perusahaan nasional dan multinasional yang telah bekerja sama selama ini dengan kami untuk mendukung pelaksanaan Tri Dharma PT. Mereka adalah World Bank, UNDP, UNICEF, UNFPA, ILO, USAID, Rand, Palladium, Asia Foundation, Mahkota, LPDP, Bank Mayapada, British Petroleum, Exxon, dan Conoco Phillips. Perguruan Tinggi di luar negeri seperti Lincoln University, Universitaet Duisburg-Essen, Mahidol University, ANU, Radboud University, National Cheng Chi University (NCCU), Tamkang University, saya juga turut memberikan penghargaan setinggi-tingginya untuk kerja samanya selama ini.

Penghargaan dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya secara khusus saya berikan kepada institusi di TNI, khususnya TNI AD, Akademi Militer (Akml), Seskoad, Secapa AD, dan segenap pengurus Yayasan Kartika Eka Paksi, serta TNI AU dan TNI AL yang dalam beberapa tahun terakhir aktif bekerja sama dengan UGM untuk membangun kapasitas SDM personil TNI yang profesional. Demikian halnya penghargaan saya berikan kepada Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta (UNJAYA) dan Universitas Jenderal Ahmad Yani Bandung (UNJANI). Semoga kerja sama ini ke depannya akan lebih terbangun di lingkungan TNI keseluruhan secara aktif.

Saya juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) dan Magister dan Doktor Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan (MDKIK) yang telah banyak melewati suka dan duka bersama, mengasah kemampuan melakukan penelitian, olah data dan menulis, serta diizinkannya saya untuk menggunakan data hasil riset PSKK-MDKIK sebagai bahan menulis artikel yang telah diterbitkan di beberapa jurnal internasional. Banyak artikel tersebut yang saya pergunakan sebagai persyaratan pengusulan kenaikan pangkat dan guru besar saya. Ucapan terima kasih saya berikan kepada: Dr. Agus Joko Pitoyo, MA; Dr. Pande Made

Kutanegara, M.Si; Dr. Hakimul Ikhwan, MA; Triyastuti Setianingrum, M.Sc; Citra Sekarjati, MPA; Dr. Novi Widyaningrum, MA; Sri Purwatiningsih, M.Kes; Henny Ekawati, M.Si; Emil Karmila, M.Dev., Ph.D (cand.); Basilica Dyah Putranti, MA, Ph.D (cand.); Eddy Kiswanto, M.Si., Ph.D (cand.); Jevri Ardiansyah, MPA; Sumini, M.Sc., Ph.D (cand.); Dyah Kartika, M.Ec.Dev.; Yam'ah Tsalatsa, MPA; Fadlan Habib, M.Sc; Igih Adisa Maisah, M.Sc; Sonyaruri Satiti, M.Sc; Dr. Ratnawati Y.S.; Idris Ikhwanuddin, S.Si; Suryo, S.Kom; Satria Aji Imawan, SIP, MA. Demikian pula ucapan terima kasih kepada tenaga kependidikan di MDKIK yakni: mbak Sunar, mbak Sinta, mbak Tiwi, mbak Amy, mbak Zeta, mbak Nurul, serta asisten mbak Wivaqussaniyah, M.Sc., mbak Wulan, M.Sc., dan mas Iqbal Irsyaddi, M.Sc.; serta tenaga kependidikan di PSKK yakni: mbak Anik, mbak Nanik, mbak Wanti, mbak Nita, mbak Liza, mbak Harti, mas Bayu, mas Afen, mbak Ika, mas Is, mas Randy, mas Sidik, mas Yasir, mas Brinto, mas Harjono, mas Surono, mas Parjono, mas Sartono.

Tidak lupa saya menghaturkan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada guru-guru saya ketika saya menuntut ilmu di SDN Center Bandar Lampung, SMPN 2 Bandar Lampung, dan SMAN 3 Yogyakarta. Guru-guru yang tanpa lelah mengajarkan dan mendidik kami dengan ilmu, budi pekerti, dan ketakwaan kepada Allah Swt. Tak lupa terima kasih saya juga sampaikan kepada kawan-kawan sesama alumni di ketiga sekolah tersebut. Spesial ucapan terima kasih saya sampaikan kepada kawan-kawan alumni AN -87 FISIPOL UGM yang telah bersama-sama mengarungi perjalanan awal menjadi mahasiswa di UGM dan hingga kini persahabatan tersebut tidak lekang oleh waktu.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan sungguh tidak cukup hanya dengan itu adalah untuk orang tua kami, ayah Prof. Drs. H. Muhammad Zein (alm.) dan ibu Hj. Sumirah Zein. Jikalau saya bisa memberikan bintang dan berjuta-juta harta sekalipun, namun itu semua belum cukup untuk membalas semua cinta kasih yang diberikan ayah dan ibu. Ayah, ini adalah janji yang pernah anakmu sampaikan ke ayah semasa hidup dulu. Anakmu pernah janji untuk bisa menjadi seorang profesor seperti yang ayah harapkan dulu. Dengan ridlo orang tua dan seizin Allah Swt, Alhamdulillah hari ini anakmu bisa meraihnya. Ibu, hasil kesabaran dan kasih sayang ibu dalam mendidik anakmu kini telah

berbuah hasil seperti yang ibu lihat sekarang ini. Ucapan terima kasih yang tak terhingga juga saya persembahkan untuk kedua bapak ibu mertua, yakni Kolonel Inf. (Purn.) H. Waras Santoso, MM (alm.) dan ibu Hj. Sri Hartini, karena telah mengizinkan putrinya untuk saya nikahi 25 tahun yang lalu. Saya hanya bisa berdoa semoga almarhum ayah kandung dan bapak mertua saya dilapangkan kuburnya dan dibukakan pintu jalan menuju surga Al-Jannah. Aamiin. Alhamdulillah pula bahwa kedua ibu kami masih dikarunia kesehatan dan kesempatan untuk selalu menemani kami dalam mengarungi kehidupan ini. Aamiin yaa Robbal Aalamiin.

Pada kesempatan yang mulia ini, perkenankan pula saya menghaturkan rasa terima kasih kepada kakak adikku, Dr. H. Muchammad Thamrin Hadna, M.Kes., Sri Utamie Endah Rokhmadiwati, Amd.AK., Drs. Thobari Hadna, Ita Yuliatiningsih, Dra. Ida Nor'aini Hadna, M.Pd., Chanafiah Saleh, S.T., Drs. Komarudin Hadna, dr. Agustiani Wahjoe Widjajanti (alm.), Maulida Zuhairini Hadna, S.H., Firdaus Hadna, S.T. Terima kasih juga untuk mas dan mbakku: Ir. Prihartono Santoso, M.M., Sri Retnoningrum, S.Pi, Dwi Hertyanto Santoso, S.IP, S.E., M.M., dan Titien Budiarti, S.E., Fannie Hertianti Santoso, S.T., dan Mursid Widarsono Affandi, S.T., M.M. Keponakan-keponakanku semua: Aldi, Rafa, Fatih, Lintang, Khansa, Orkan, Ali, Diqie, Dianie, Aulia, Fariz, Firza, Bayu, dan Angga.

Kepada anak-anakku tercinta, Abyan Hermuzakki Hadna, dan Azzahra Herheinisa Hadna, dari kalianlah Papa belajar esensi penting kehidupan, terima kasih telah menjadi anak-anak hebat yang menginspirasi. Tidak ada kata yang memadai untuk mengapresiasi dukungan dan cinta yang telah dan selalu aku harapkan dari istriku tercinta, Prof. Dr. rer.nat. Triana Hertiani, S.Si., M.Si., Apt. yang telah dikukuhkan sebelumnya sebagai Guru Besar Fak. Farmasi UGM pada 11 Februari 2021. Insya Allah menghantarkan kita dalam keluarga sakinah, mawaddah, warohmah, bersama meraih Jannah-Nya, Aamiin Aamiin Yaa Rabb.

*Hadirin yang saya hormati,*

Dengan segala kerendahan hati, saya haturkan terima kasih yang tidak terhingga, atas kesediaannya berbagi bersama di hari yang

berbahagia ini, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, mohon dimaafkan atas segala kekurangan dan kekhilafan. *Barakallahu fikum* (Semoga Allah Swt memberkahi kita semua) Aamiin Yaa Rabbal ‘Alamin.

*Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh.*



## DAFTAR PUSTAKA

- Abbaszadeh, M. R., Salehi, M., & Faiz, S. M. 2019. Association of information technology and internal controls of Iranian state agencies. *International Journal of Law and Management*, 61(1), 133-150. doi:10.1108/IJLMA-12-2017-0304
- Acemoglu, D., & Robinson, J.A., 2012. *Why nations fail: the origins of power, prosperity, and poverty*. 1<sup>st</sup> ed. Crown Publishers, USA.
- Adhikera, R., Kumorotomo, W., Djunaedi, A., **Hadna, A.H.**, 2022. Impact of Agile Organization and Leadership on Employee Experience: Case Study UPTD (Technical Implementing Service Unit) Digital Service Center, Geospatial Data and Information of West Java Provincial Government (Jabar Digital Service). *Populasi*, Vol. 30, Issue 2, pp. 103-125.
- Aghion, P., Akcigit, U., Bergeaud, A., Blundell, R. 2019. Innovation and Top Income Inequality. *Review of Economic Studies*. 86, 1-45. doi:10.1093/restud/rdy027
- Alam, A., Uddin, M., & Yazdifar, H. 2019. Institutional determinants of R&D investment: Evidence from emerging markets. *Technological Forecasting and Social Change*, 138, 34-44.
- Anderson, J.E., 2009. *Globalization and income distribution: A specific factors continuum approach* (No. w14643). National Bureau of Economic Research.
- Anessi-Pessina, E., Barbera, C., Langella, C., Manes-Rossi, F., Sancino, A., Sicilia, M., & Steccolini, I. 2020. Reconsidering public budgeting after the COVID-19 outbreak: key lessons and future challenges. *Journal of Public Budgeting, Accounting &*

*Financial Management*, 32(5), 957-965. doi:10.1108/JPBAFM-07-2020-0115

- Baumol, W. J. 2002. *The Free-market Innovation Machine. Analyzing the Growth Miracle of Capitalism*, Princeton, NJ : Princeton University Press.
- Bekkers, V., & Tummers, L. 2018. Innovation in the Public Sector: Towards an Open and Collaborative Approach. *International Review of Administrative Sciences*. doi:10.1177/0020852318761797
- Bell, A. S., & Mallinson, D. J. 2021. Constraints on Policy Learning: Designing the Regional Greenhouse Gas Initiative in Pennsylvania. *Policy Design and Practice*. doi:10.1080/25741292.2021.1928970
- Berry, F.S. & Berry, W.D. 1990. State Lottery Adoptions as Policy Innovations: An Event History Analysis. *The American Political Science Review*, Vol.84, No.2 (Jun., 1990) p.395-415. <http://www.jstor.org/stable/1963526?origin=JSTOR-pdf>
- Bhattacharya, U., Hsu, P.-H., Tian, X., & Xu, Y. 2017. What Affects Innovation More: Policy or Policy Uncertainty? *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 52(5), 1869-1901. doi:10.1017/S0022109017000540
- Bloch, C. & Bugge, M.M. 2013. Public Sector Innovation—From Theory to Measurement. *Structural Change and Economic Dynamics*. dx.doi.org/10.1016/j.strueco.2013.06.008
- Brookfield institute for innovation+entrepreneurship. 2018. *Exploring Policy Innovation: Tools, Techniques+Approaches*. Toronto, Canada. <http://brookfieldinstitute.ca>
- Capano, G., & Galanti, M. T. 2021. From Policy Entrepreneurs to Policy Entrepreneurship: Actors and Actions in Public Policy Innovation. *Policy & Politics*. doi:10.1332/030557320x15906842137162

- Castells , M. and Himanen, P. 2002 . *The Information Society and the Welfare State; The Finnish Model* , Oxford : Oxford University Press
- Christodoulou, P., Decker, S., Douka, A.-V., Komopoulou, C., Peristeras, V., Sgagia, S., Vardouniotis, D. 2018. *Data makes the public sector go round*. Paper presented at the Electronic Government: 17th IFIP WG 8.5 International Conference, EGOV 2018, Krems, Austria, September 3-5, 2018, Proceedings 17.
- Clausen, T. H., Demircioğlu, M. A., & Alsos, G. A. 2019. Intensity of Innovation in Public Sector Organizations: The Role of Push and Pull Factors. *Public Administration*. doi:10.1111/padm.12617
- Costa, J., & Matias, J. C. O. 2020. Open Innovation 4.0 as an Enhancer of Sustainable Innovation Ecosystems. *Sustainability*. doi:10.3390/su12198112
- Das, K. et al. 2016. *Unlocking Indonesia's Digital Opportunity*. McKinsey Indonesia Office.
- De Palo, C., Karagiannis, S., & Raab, R. 2018. Innovation and Inequality in the EU: for Better or for Worse? In *SSRN Electronic Journal* (Vol. 129, Issue 4). Publications Office of the European Union. <https://doi.org/10.2760/365700>
- Dietrich, H., & Schibeci, R. 2003. Beyond public perceptions of gene technology: community participation in public policy in Australia. *Public Understanding of Science*, 12(4), 381-401.
- Ding, L., Wu, Y., Ma, Y., & Zhang, L. 2022. Environmental Regulation and the Innovation Performance of Chinese Export Firms: A Quasi-Natural Experiment Based on the Law of Promoting Cleaner Production. *Sage Open*. doi:10.1177/21582440221129257
- Dye, Thomas R. 2017. *Understanding Public Policy*. 15<sup>th</sup> ed. Boston: Pearson.

- Echeverri-Carroll, E., Ayala, S.G. 2009. Wage differentials and the spatial concentration of high-technology industries. *Papers in Regional Science*, 88: 623–641
- Ferdian, F., **Hadna, A. H.**, Pitoyo, A. J., & Susilastuti, D. H. (2023). The Role of Sociocultural Factors in TNI AD Non-Commissioned Officer's Motivations, Goals, and Pro-Organizational Behavior. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 26(5), 1–15.
- Fisman, R., & Werker, E. 2011. Innovations in Governance. *Innovation Policy and the Economy*, 11, 79-102. doi:10.1086/655819
- Fung, A. 2015. Putting the public back into governance: The challenges of citizen participation and its future. *Public administration review*, 75(4), 513-522.
- Glaeser, E.L. 1999. Learning in cities. *Journal of Urban Economics*, 46: 254–277
- Glor, E.D. 2021. *A Nomenclature and Classification System for Antecedent of Public Policy Innovation Trailblazing and Adoption Derived from Systematic Literature Review—III*. The Innovation Journal: The Public Sector Innovation Journal, Vol. 26(2). Article 4. 1–26. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85116915069&partnerID=40&md5=82158e3c79ff013b60ef2f1e83b4aa4d>
- Goyal, N. 2021. Explaining Policy Success Using the Multiple Streams Framework: Political Success Despite Programmatic Failure of the Solar Energy Policy in Gujarat, India. *Politics and Policy*, 49(5), 1021–1060. <https://doi.org/10.1111/polp.12426>
- Hadna, A. H.**, & Askar, M. W. 2022a. The impact of conditional cash transfers on low-income individuals in Indonesia. *Advances in Southeast Asian Studies*, 15(1), 23-41.
- Hadna, A.H.**, Kiswanto, E., Ardiansyah, J. 2017b. *Political Linkages dan Model Representasi Politik di Indonesia*. Cetakan Pertama, Indie Book Corner, Yogyakarta.

- Hadna, A.H.**, Listyaningsih, U., Ihwanudin, I., 2022c. To What Extent Street-Level Bureaucrats Used Their Discretionary Power During the COVID-19 Pandemic in Indonesia. *International Journal of Public Sector Management*. Vol.35, No.7, pp. 806-820.
- Hadna, A.H.** 2022d. An Exploratory Study of the Determinants of Decision-Making Process of Local Government During the COVID-19 Pandemic in Indonesia. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*. 7 (3). pp. 293-313.
- Hadna, A.H.**, 2022e. An Evaluation of the School Operational Assistance (BOS) Policy and Its Effect on Teacher Performance in Indonesia. *Malaysian Online Journal of Educational Management*. Vol.10, Issue 2. p. 1-14. <http://mojem.um.edu.my>
- Harsono, R. D. T., **Hadna, A. H.**, Kutaneegara, P. M., & Maryudi, A. (2023). Joint Command for Regional Defense III: Implementation of Eastern Indonesia's Defense Policy in The Communication Dimension. *Journal Research of Social Science, Economics, and Management*, 3(1), 142–162. <https://doi.org/10.59141/jrssem.v3i1.525>
- Hassanudin, Darwin, M., Abdullah, I., **Hadna, A.H.**, 2023. Governance Development in Challenge Situations: A Case Study of the Governance in Aceh after 2005 Memorandum of Agreement. *International Journal of Science and Society*. Vol. 5, Issue 1.
- Hatipoglu, O. 2012. The relationship between inequality and innovative activity: a Schumpeterian theory and evidence from cross-country data. *Scottish Journal of Political Economy*, 59(2), 224-248.
- Head, B. W. 2016. Toward more “evidence-informed” policy making? *Public administration review*, 76(3), 472-484.
- Hourihan, M., & Parkes, D. 2016. Federal R&D budget trends: A short summary. *American Association for the Advancement of Science, report*.

- Kafka, K. I., Kostis, P. C., & Petrakis, P. E. 2021. Institutional effects on innovation and the requirements for structural reforms. *Journal of the Knowledge Economy*, 1-25.
- Karakiza, M. 2015. The impact of social media in the public sector. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 175, 384-392.
- Khalili, A. 2017. Creative and innovative leadership: measurement development and validation. *Management Research Review*, 40(10), 1117-1138. doi:10.1108/MRR-09-2016-0213
- Kianto, A., Sáenz, J., & Aramburu, N. 2017. Knowledge-based human resource management practices, intellectual capital and innovation. *Journal of business research*, 81, 11-20. doi:https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2017.07.018
- Kitzmüller, L., Rodrik, D., & Hanna, R. 2021. *Innovation and Income Inequality: Creating a More Inclusive Economy in Germany Second Year Policy Analysis* (Issue March).
- Krugman, P., 2008. *Trade and Wages, Reconsidered*. Brookings Pap. Econ. Act. 39.103-154
- Kusmargono, C.A., Kiranajaya, W., **Hadna, A.H.**, Sumaryono. 2023. The Effect of Authentic Leadership on Innovative Work Behavior Mediated by Work Meaningfulness. *Journal of Psychology and Behavior Studies*. 3(2), pp. 01-07. DOI: 10.32996/jpbs.2023.3.2.1
- Lambooy, J. 2005. Innovation and Knowledge: Theory and Regional Policy. *European Planning Studies*. 13:8, 1137-1152. DOI: 10.1080/09654310500336444
- Lasswell, H.D., 1951. *The Policy Orientation*, in Lerner and Lasswell (eds). 1951.
- Law, S.H., Naseem, N.A.M., Lau, W.T., Trinugroho, I., 2020. Can innovation improve income inequality? Evidence from panel data. *Economic System*. Vol. 44, Issue 4., <https://doi.org/10.1016/j.ecosys.2020.100815>

- Lee, N. 2011. Are innovative regions more unequal? Evidence from Europe. *Environment and Planning C: Government and Policy*, 29(1), 2–23. <https://doi.org/10.1068/c1046r>
- Lee, N., & Rodríguez-pose, A. 2013. Innovation and spatial inequality in europe and USA. *Journal of Economic Geography*, 13(1), 1–22. <https://doi.org/10.1093/jeg/lbs022>
- Lee, W. C., & Law, S. H. 2016. The roles of formal and informal institutions on innovations activity. *Jurnal Ekonomi Malaysia*, 50(2), 167-179.
- Link, A. N. 2022. Vannevar Bush: A Public Sector Entrepreneur. *Foundations and Trends® in Entrepreneurship*. doi:10.1561/03000000087
- Liu, Qingchun & Lawell, Cynthia Lin. 2015. *The Effects of Innovation on Income Inequality in China*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:157162455>
- Ludwig, G. 2019. The Role of Law in Transformative Environmental Policies—A Case Study of “Timber in Buildings Construction in Germany”. *Sustainability*. doi:10.3390/su11030842
- Manzoor, A. 2016. Emerging role of big data in public sector. In *Big Data: Concepts, Methodologies, Tools, and Applications* (pp. 2458-2478): IGI Global.
- Martin, B., 2012. The evolution of science policy and innovation studies. *Research Policy*.
- Maslin-Ostrowski, P., Drago-Severson, E., Ferguson, J., Marsick, V. J., & Hallett, M. 2017. An Innovative International Community Engagement Approach. *Journal of Transformative Education*. doi:10.1177/1541344617707840
- Ministry of Finance of Republic of Indonesia. 2020. *Innovate Indonesia: Unlocking Growth Through Technological Transformation*. Asian Development Bank, Philippines.

- Osborne, S.P & Brown, L. 2011. Innovation, Public Policy and Public Service Delivery in the UK. The Word that would be King? *Public Administration*. DOI: 10.1111/j.1467-9299.2011.01932.x
- Pandey, M.D. & Nathwani, J.S. 1996. Measurement Socio-Economic Inequality Using the Life-Quality Index. *Social Indicators Research* , 1996, Vol. 39, No. 2 (1996), pp. 187-202. Springer. : <https://www.jstor.org/stable/27522951>.
- Parsons, W., 2006. *Public Policy: An Introduction to the Theory and Practice of Policy Analysis*. 2<sup>nd</sup> ed. Edward Elgar Publishing, Ltd.
- Phiri, M. Z., Molotja, N., Makelane, H., Kupamupindi, T., & Ndinda, C. 2016. Inclusive innovation and inequality in South Africa: a case for transformative social policy. *Innovation and Development*, 6(1), 123-139.
- Pratama, A. B. 2019. The landscape of public service innovation in Indonesia: A comprehensive analysis of its characteristic and trend. *Innovation & Management Review*, 17(1), 25-40.
- Radosevic, S. 2012. Innovation Theory Studies Between Theory and Practices: A Literature Review Based Analysis. *STI Policy Review*. Vol.3, No.1
- Rahman, M., Mustari, N., Novitasari, N. F., & Atirah, S. 2020. E-Government Based Education Policy Innovation Through E-Panrita Applications (Online Attendance Study for Teacher at SMAN 3 Luwu). *Journal of Local Government Issues*. doi:10.22219/logos.v3i1.10987
- Ravallion, M. 2016. *The Economics of Poverty: History, Measurement, and Policy*. Oxford University Press, USA.
- Santos, M., Sequeira, T. N., & Ferreira-Lopes, A. 2017. Income inequality and technological adoption. *Journal of Economic Issues*, 51(4), 979-1000.
- Schumpeter, J. A. 1911, 1936. *The Theory of Economic Development* (Cambridge, MA: MIT Press). (Translation in 1936 of the original German edition.)



- Schumpeter, J. A. 1942. *Capitalism, Socialism and Democracy*. New York: Harper & Brothers.
- Şen, A., & Eren, E. 2012. Innovative Leadership for the Twenty-First Century. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 41, 1-14. doi:<https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.04.001>
- Setyawan, I., **Hadna, A. H.**, Kutaneegara, P. M., & Darwin, M. (2023). Cultural Intelligence in Military Leaders and Its Influence on Performance through Cultural Intelligence Scale. *Interdisciplinary Social Studies*, 2(11), 2547–2559. <https://doi.org/10.55324/iss.v2i11.516>
- Shahabadi, A., Nemati, M., & Hosseinidoust, S. E. 2017. The effect of knowledge economy factors on income inequality in the selected Islamic countries. *Journal of the Knowledge Economy*, 8(4), 1174-1188.
- Singh, L., & Mengesha, Z. D. 2023. Income Inequality, Innovation and Human Capital Nexus: A Comparative Analysis of Asia-Pacific Countries. *Seoul Journal of Economics*, 36(1), 1–51. <https://doi.org/10.22904/sje.2023.36.1.001>
- Sørensen, E. 2016. Enhancing Policy Innovation by Redesigning Representative Democracy. *Policy & Politics*. doi:10.1332/030557315x14399997475941
- Sørensen, E., & Torfing, J. 2011. Enhancing Collaborative Innovation in the Public Sector. *Administration & Society*. doi:10.1177/0095399711418768
- Stiglitz, J., 2012. *The Price of Inequality: How Today's Divided Society Endangers Our Future*, 2<sup>nd</sup> ed. W.W. Norton, New York
- Subramaniam, M., & Youndt, M. A. 2005. The influence of intellectual capital on the types of innovative capabilities. *Academy of Management Journal*, 48(3), 450-463.
- Sulaiman, T., **Hadna, A.H.**, Darwin, M., Kutaneegara, P.M., 2023. The Transformational Leadership, Public Service Motivation and Performance of Handling The COVID-19 Pandemic: The Army

Soldiers in Implementing Military Operations. *General Management*, Vol. 24, No. 193. DOI: 10.47750/QAS/24.193.19

- Sumiyana; Wivaqussaniyyah; Darwin, M., **Hadna, A.H.**, 2022. Partnership Building Between NGOs and Indonesian Local Governments: A Case Study of Integrative Leadership Immersing Itself in Innovativeness. *International Journal of Social Economics*. Vol. 49, No.7. pp. 1029-1048. DOI 10.1108/IJSE-07-2021-0377
- Suryanef, Ananda, A., Effendi, Z. M., Anwar, S., & Rafni, A. 2019. *The Implementation of Education Policy in Padang City: The Perspective of Innovative Governance*. doi:10.2991/icesshum-19.2019.146
- Tahir, D. S., Jaya, W. K., Darwin, M. M., & **Hadna, A. H.** (2019). Strategies for rescuing banking in the economic crisis: A study of the new institutional economic perspective. *International Journal of Scientific and Technology Research*, 8(8), 1600–1604
- Termeer, C., & Nooteboom, S. 2014. Innovative leadership through networks. *Public innovation through collaboration and design*, 170-187.
- Tian, M., Deng, P., Zhang, Y., & Salmador, M. P. 2018. How does culture influence innovation? A systematic literature review. *Management Decision*, 56(5), 1088-1107. doi:10.1108/MD-05-2017-0462
- Țigănașu, R., Pascariu, G. C., & Nijkamp, P. 2019. Performance and Innovation in the Public Sector of the European Union Countries. An Analysis Based on the Dynamics of Perceptions, 2009-2016. *Transylvanian Review of Administrative Sciences*. doi:10.24193/tras.si2019.6
- Tönurist, P., Kattel, R., & Lember, V. 2017. Innovation Labs in the Public Sector: What They Are and What They Do? *Public Management Review*. doi:10.1080/14719037.2017.1287939
- United Nation Development Program. 2015. Work for Human Development. *Human Development Report*.

- Vries, H. d., Bekkers, V., & Tummers, L. 2015. Innovation in the Public Sector: A Systematic Review and Future Research Agenda. *Public Administration*. doi:10.1111/padm.12209
- Walker, L.J. 1969. The Diffusion of Innovations among the American States. *American Political Science Review*. 63:880-99.
- Weimer, M., Cseres, K., Eckes, C., Brownsword, R., van Calster, G., Garnett, K., Hervey, T. K. 2017. The Rule of Law in the Technological Age Challenges and Opportunities for the EU Collected Papers. *Amsterdam Law School Research Paper*(2017-35)
- Xiao, Z., & Cai, Z. 2019. The Relationship Between Knowledge Workers and Innovative Behavior Based on Brand Identity. *Open Journal of Business and Management*. doi:10.4236/ojbm.2019.72051
- Yusuf, Arief A. 2020. The Effect of New Technologies on the Indonesian Economy: An Economy-Wide Assessment. *CSIS Working Paper Series*. Jakarta.
- Zhang, X. 2022. Understanding innovation policy governance: A disaggregated approach. *Review of Policy Research*, 39(3), 303-329.

Website:

<https://www.statista.com/statistics/1352919/indonesia-randd-investment-from-gdp/>

<https://lestari.kompas.com/read/2023/12/25/120000286/energi-terbarukan-di-negara-berkembang-4-kali-lebih-mahal-daripada-negara>

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Prof. Dr. sc. pol. Agus Heruanto Hadna,  
M.Si

NIP : 196708121998031003

NIDN : 0012086704

Jabatan Fungsional/ : Guru Besar

Golongan : Pembina Tk. I/ IVb

Tempat, tanggal lahir : Purwokerto, 12 Agustus 1967

Alamat Rumah : Jl. Ki Ageng Pemanahan 43, Sorosutan,  
Yogyakarta. 55162

Nomor HP : 0811 253 099

Alamat Kantor : Jl. Sosio Yustisia No.1, UGM,  
Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten  
Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta  
55281

Nomor Telepon Kantor : (0274) 563362

Alamat e-mail : hadna@ugm.ac.id

### Data Keluarga

Istri : Prof. Dr.rer.nat. Triana Hertiani, M.Si.,  
S.Si., Apt.

Anak : Abyan Hermuzakki Hadna  
Azzahra Herheinisa Hadna

### Riwayat Pendidikan

SD : SDN Center Labuhanratu, Bandar Lampung

SMP : SMPN 2 Bandar Lampung

SMA : SMA Negeri 3 Yogyakarta

- Sarjana (S-1) : Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada
- Magister (S-2) : Administrasi Publik, Program Pasca Sarjana Administrasi Publik, Universitas Gadjah Mada
- Doktor (S-3) : Administrasi Publik, Institut fuer Politikwissenschaft, Fachbereich Gesellschaftswissenschaften, Universitaet Duisburg-Essen, Jerman

### **Riwayat Pekerjaan**

- 2020 – sekarang : Ketua Program Studi Doktor Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan, Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada
- 2000 – sekarang : Peneliti Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, Universitas Gadjah Mada
- 1995 – sekarang : Dosen Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada
- 2019 – 2020 : Ketua Departemen Kebijakan dan Manajemen Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Gadjah Mada
- 2013 – 2019 : Kepala Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, Universitas Gadjah Mada
- 2011 – 2016 : Ketua Koalisi Kependudukan dan Pembangunan, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
- 2009 – 2011 : Ketua Program Pascasarjana Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Gadjah Mada
- 2007 – 2009 : Sekretaris Prodi Magister Studi Kebijakan, Universitas Gadjah Mada

### **Organisasi Profesi**

1. Indonesia Association for Public Administration (IAPA)
2. Koalisi Indonesia untuk Kependudukan dan Pembangunan

### **Penghargaan yang pernah diterima**

1. Satya Lencana Karya Satya 10 tahun dari Pemerintah RI
2. Satya Lencana Karya Satya 20 tahun dari Pemerintah RI
3. Penghargaan Kesetiaan 25 tahun dari Universitas Gadjah Mada

### **Riwayat Penelitian (5 tahun terakhir)**

- 2024 : Ketua Peneliti  
 Penelitian Layanan Kewarganegaraan  
 Ditjen Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak  
 Asasi Manusia, RI
- 2023 - 2024 : Ketua Peneliti  
 Riset Inovatif Produktif (Rispro) invitasi  
 berjudul: Revisiting Ways  
 Of Work: Merumuskan Cara Kerja Masa  
 Depan di Organisasi Sektor Publik.  
 Lembaga Pengelola Dana Pendidikan,  
 Kementerian Keuangan Republik Indonesia
- 2023 : Ketua Peneliti  
 Praevaluasi Akhir RPJMN (Rencana  
 Pembangunan Jangka Menengah Nasional)  
 2020-2024 bidang Stunting dan Perlindungan  
 Sosial, BAPPENAS RI
- 2023 : Ketua Peneliti  
 Penyusunan Dokumen Strategi Pengembangan  
 Produksi UMK Kabupaten Kampar
- 2022 : Ketua Peneliti  
 Kajian Rencana Induk dan Kelitbangan  
 BAPPEDA LITBANG Pemkot Balikpapan;  
 Kajian Road Map SIDA Kota Balikpapan 2021-  
 2026, BAPPEDA LITBANG Pemkot  
 Balikpapan
- 2022 : Ketua Peneliti  
 Study on Promoting Affirmative Policies to  
 Accelerate Local Economic Development in  
 Disadvantaged Kabupaten in Indonesia.

- MAHKOTA
- 2021 : Ketua Peneliti  
Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan Kinerja  
PPAT Indonesia; Kementerian Agraria dan Tata  
Ruang BPN
- 2019 : Ketua Peneliti  
Study Optimalisasi Peranan CSR dalam  
Pembangunan di Kabupaten Katingan TA 2019
- 2019 : Ketua Peneliti  
Efektivitas Pengelolaan Dana Bos Terhadap  
Kinerja Sekolah di Indonesia.  
Pusat Penelitian Kebijakan, Balitbang,  
Kemendikbud

### **Riwayat Publikasi (5 tahun terakhir)**

#### **Jurnal:**

- Sulaiman, T., Hadna, A. H., Darwin, M., & Kutanegara, P. M. (2023). The Transformational Leadership, Public Service Motivation And Perfomance Of Handling The Covid-19 Pandemic : The Army Soldiers In Implementing Military Operations. *Quality - Access to Success*, 24(193), 176–181. <https://doi.org/10.47750/QAS/24.193.19>
- Fadli, F., Hadna, A. H., Arfani, R. N., & Lutfiyanto, G. (2024). Time Perspective as a Moderator in the Relationship between Stimuli Received by the Indonesian Reserve at Its Formation Stages Toward Expected Attitudes and Behaviors. *International Journal of Social Science Research and Review*, 7(1), 338–353. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.47814/ijssrr.v7i1.1838>
- Harsono, R. D. T., Hadna, A. H., Kutanegara, P. M., & Maryudi, A. (2023). Joint Command for Regional Defense III: Implementation of Eastern Indonesia’s Defense Policy in The Communication Dimension. *Journal Research of Social*

*Science, Economics, and Management*, 3(1), 142–162.  
<https://doi.org/10.59141/jrssem.v3i1.525>

- Wiranto, H., Darwin, M. M., Hadna, A. H., & Moeljono, D. (2023). Analysis of the Roles and Capabilities of the Indonesian National Armed Forces in Response to the COVID-19 Pandemic as a Non-Military Threat. *International Journal of Science and Society*, 5(5), 403–423.  
<https://doi.org/10.54783/ijssoc.v5i5.902>
- Banjar, S. S., Hadna, A. H., Darwin, M., & Kutanegara, P. M. (2023). The Role of Babinsa as Street-Level Bureaucrats in COVID-19 Handling through a Collaborative Governance Approach. *International Journal of Science and Society*, 5(3), 87–101.  
<https://doi.org/10.54783/ijssoc.v5i3.717>
- Wardhana, T. A., Hadna, A. H., Darwin, M., & Hardi, A. S. (2023). Passive Franchise as an Innovation in the Development of Cooperative-Based Retail Networks. *Interdisciplinary Social Studies*, 2(12), 2671–2683.  
<https://doi.org/10.55324/iss.v2i12.555>
- Ferdian, F., Hadna, A. H., Pitoyo, A. J., & Susilastuti, D. H. (2023). The Role of Sociocultural Factors in TNI AD Non-Commissioned Officer's Motivations, Goals, and Pro-Organizational Behavior. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 26(5), 1–15.
- Widodo, A. C., Hadna, A. H., & Listyaningsih, U. (2023). Implementation Analysis of Army Polytechnic Research Management for The Armament Development of The Indonesian Army. *Jurnal Populasi*, 31(1), 53.  
<https://doi.org/10.22146/jp.84379>
- Johannes, A. E., Kusumasari, B., Hadna, A. H., & Retnandari, N. D. (2023). Human Trafficking : A Systematic Review and Future Research Agenda. *Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik*, 27(November), 107–129.



- Ferdian, F., Hadna, A. H., Pitoyo, A. J., & Susilastuti, D. H. (2023). The Influence of Transformational Leadership, Perceived Affirmation Policy and Educational Process on the Pro-Organizational Behavior of the Indonesian Army Non-Commissioned Officers. *International Journal of Social Science Research and Review*, 6(4), 390–407. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.47814/ijssrr.v6i4.1054>
- Imawan, S. A., Syafiq, M., Sofiyah, Hadna, A. H., & Djunaedi, A. (2023). Digital Transformation in Public Sector: Case Study on Licensing Services to Start a Business in Pekalongan City. *Endless: International Journal of Future Studies*, 6(2), 235–253. <https://doi.org/10.54783/endlessjournal.v6i2.173>
- Kusmargono, C. A., Jaya, W. K., Hadna, A. H., & Sumaryono, S. (2023). The Effect of Authentic Leadership on Innovative Work Behavior Mediated by Work Meaningfulness. *Journal of Psychology and Behavior Studies*, 3(2), 01–07. <https://doi.org/10.32996/jpbs.2023.3.2.1>
- Hassanudin, Darwin, M. M., Abdullah, I., & Hadna, A. H. (2023). Governance Developments in Challenge Situations: A Case Study of the Governance in Aceh after 2005 Helsinki Memorandum of Agreement. *International Journal of Science and Society*, 5(1), 244–258. <https://doi.org/10.54783/ijssoc.v5i1.653>
- Setyawan, I., Hadna, A. H., Kutaneegara, P. M., & Darwin, M. (2023). Cultural Intelligence in Military Leaders and Its Influence on Performance through Cultural Intelligence Scale. *Interdisciplinary Social Studies*, 2(11), 2547–2559. <https://doi.org/10.55324/iss.v2i11.516>
- Semangun, S. H., Darwin, M., & Hadna, A. H. (2022). Business Incubator Model to Tackle Indonesia ' s Agricultural Crisis : An Agile Governance Perspective. *International Journal of Society, Development and Environment in the Developing World*, 6(1), 12–26.

- Adhikersa, R., Kumorotomo, W., Djunaedi, A., & Hadna, A. H. (2022). Impact of Agile Organization and Leadership on Employee Experience: Case Study UPTD (Technical Implementing Service Unit) Digital Service Center, Geospatial Data and Information of West Java Provincial Government (Jabar Digital Service). *Jurnal Populasi*, 30(2), 103. <https://doi.org/10.22146/jp.80191>
- Hadna, A. H. (2022). an Evaluation of the School Operational Assistance (Bos) Policy and Its Effect on Teacher Performance in Indonesia. *Malaysian Online Journal of Educational Management*, 10(2), 1–14.
- Sumiyana, Wivaqussaniyyah, Darwin, M., & Hadna, A. H. (2022). Partnership building between NGOs and Indonesian local governments: a case study of integrative leadership immersing itself in innovativeness. *International Journal of Social Economics*, 49(7), 1029–1048. <https://doi.org/10.1108/IJSE-07-2021-0377>
- Hadna, A. H., & Askar, M. W. (2022). The impact of conditional cash transfers on educational inequality of opportunity. *Advances in Southeast Asian Studies*, 15(1), 23–41. <https://www.jstor.org/stable/43670198>
- Hadna, A. H., Listyaningsih, U., & Ihwanudin, I. (2022). To what extent have street-level bureaucrats used their discretionary powers during the COVID-19 pandemic in Indonesia? *International Journal of Public Sector Management*, 35(7), 806–820. <https://doi.org/10.1108/IJPSM-12-2021-0272>
- Hadna, A. H. (2022). An Exploratory Study of the Determinants of the Decision-Making Process of Local Government During the COVID-19 Pandemic in Indonesia. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 7(3), 293–313. <https://doi.org/10.15294/ipsr.v7i3.40268>
- Hadna, A. H., Zulaela, Ardiansyah, J., & Habib, F. (2022). Stand-Alone Conditional Cash Transfer in Regards to Reducing

Stunting in Indonesia: Evidence From a Randomized Controlled Trial. *Journal of Population and Social Studies*, 31, 435–454. <https://doi.org/10.25133/JPSSV312023.025>

- Falah, A. I., & Hadna, A. H. (2022). Problematika Pendidikan Masa Pandemi di Indonesia pada Daerah 3-T (Terluar, Tertinggal, dan Terdepan). *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 7(2), 164–185. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v7i2.2997>
- Falah, A. I., Kutaneegara, P. M., & Hadna, A. H. (2022). Pendekatan Budaya dan Agama dalam Penanganan Pandemi Covid-19 di Bali dan Jawa Tengah. *Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, Dan Tradisi)*, 8(2), 245–259. <https://doi.org/10.18784/smart.v8i2.1695>
- Wahyu Broto, D., Darwin, M., Hadna, A. H., & Sumarto, M. (2021). Pork Barrel Politics of Welfare in Indonesia: Some Insights from Yogyakarta Province. *International Journal of Society, Development and Environment in the Developing World*, 5(1), 27–41.
- Ragandhi, A., Hadna, A. H., Setiadi, S., & Maryudi, A. (2021). Why do greater forest tenure rights not enthuse local communities? An early observation on the new community forestry scheme in state forests in Indonesia. *Forest and Society*, 5(1), 159–166. <https://doi.org/10.24259/fs.v5i1.11723>
- Hadna, A. H. (2021). Policy Formulation During Pandemic COVID-19: A New Evidence of Multiple Streams Theory from Yogyakarta, Indonesia. *Journal of Public Administration and Governance*, 11(3), 36. <https://doi.org/10.5296/jpag.v11i3.18741>
- Tanjung Sutarna, I., Agus Margono, S., & Hadna, A. H. (2021). Post Decentralization Corruption: A study on perpetual corruption at the local level in West Lombok. *Policy & Governance Review*, 5(3), 274. <https://doi.org/10.30589/pgr.v5i3.461>
- Sulistyo, A., Rijanta, R., Hadna, A. H., & Giyarsih, S. R. (2021). Environmental Politics: Grassroots Innovations in Conserving

- Geopark Environment (Study in Gunung Sewu UNESCO Global Geopark). *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 6(2), 158–176. <https://doi.org/10.15294/ipsr.v6i2.29531>
- Kurniawati, N., Hadna, A. H., & Kurniawan, B. D. (2021). Muhammadiyah as Policy Entrepreneur in Policy Change Making of Oil and Gas Law. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 6(1), 73–89. <https://doi.org/10.15294/ipsr.v6i1.29202>
- Iswahyudi, F., Hadna, A. H., Darwin, M., & Kutanegara, P. M. (2021). The Determinant of Policy Termination Post-Leadership Succession in Indonesia Context. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 6(2), 212–226. <https://doi.org/10.15294/ipsr.v6i2.31154>
- Nasrulhaq, Hadna, A. H., Madani, M., & Malik, I. (2020). Intersectoral Collaboration Issues, Actions, and Structure: Study of Generation Planning Program in Makassar City, Indonesia. *Advances in Economics, Business and Management Research*, 122(Annual Conference of Indonesian Association for Public Administration (IAPA 2019) Intersectoral), 54–77. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200301.004>
- Seftyono, C., Santoso, P., Darwin, M. M., & Hadna, A. H. (2020). Mainstreaming Idea: Alternative Reading of State and Civil Society Relation in Policy Making. *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 43. <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v6i1.25474>
- Seftyono, C., Santoso, P., Darwin, M. M., & Hadna, A. H. (2020). The Science Openness Movement in Indonesia: An Introduction for re- Reading Civil Society in Policy Discourse. *Journal of Government Civil Society*, 4(1), 1–18. <https://doi.org/10.31000>
- Iswahyudi, F., Darwin, M., Hadna, A. H., & Kutanegara, P. M. (2020). Kontekstualisasi Adopsi Kebijakan: Studi Kasus Kebijakan Pengendalian Covid-19 di Korea Selatan. *Jurnal*

*Borneo Administrator*, 16(2), 117–136.  
<https://doi.org/10.24258/jba.v16i2.682>

- Iswahyudi, F., Hadna, A. H., Darwin, M., & Made, P. (2020). Decision Making and Effective Flood Control in Indonesia : A Case Study of Jakarta. *International Journal of Society, Development and Environment in the Developing World*, 4(3), 33–46.
- Hastuti, Y., Darwin, M., Sukamdi, S., & Hadna, A. H. (2019). Perawatan Lansia: Menerjemahkan Peraturan Nasional ke dalam Program Lokal di Kota Yogyakarta. *Jurnal Populasi*, 26(2), 29. <https://doi.org/10.22146/jp.44148>
- Uswanas, M., Keban, Y. T., Hadna, A. H., & Kutaneegara, P. M. (2018). Kinerja Pendidikan Dasar Setelah Sembilan Tahun Otonomi Asimetris di Provinsi Papua Barat. *Jurnal Populasi*, 26(2), 61. <https://doi.org/10.22146/jp.44150>
- Hadna, A. H., & Nasrulhaq, N. (2019). Collaborating Local Government Agencies to Prevention Adolescent Reproductive Health in Makassar, Indonesia. *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 9(1), 12–27. <https://doi.org/10.26618/ojip.v9i1.2025>
- Tahir, D. S., Jaya, W. K., Darwin, M. M., & Hadna, A. H. (2019). Strategies for rescuing banking in the economic crisis: A study of the new institutional economic perspective. *International Journal of Scientific and Technology Research*, 8(8), 1600–1604.
- Zaenuddin, M., Kumorotomo, W., Saleh, S., & H. Hadna, A. (2018). Dualisme Kelembagaan Antara Pemerintah Kota Dan Badan Pengusahaan Batam Serta Dampaknya Terhadap Kinerja Perekonomian Di Kota Batam. *Journal of Applied Business Administration*, 1(2), 219–231. <https://doi.org/10.30871/jaba.v1i2.613>
- Amien, M. S., Darwin, M., & Hadna, A. H. (2018). The Role of School Culture in the Development of Innovation in Indonesia

's Elementary Schools : The Case of Sekolah Alam Avesiena , Malang. *International Journal of Society, Development and Environment in the Developing World*, 2(2), 59–72.

### **Buku:**

- Hadna, A.H., Ruhyanto, A., Sulistiono, B., Prasetyo, K., (2023). *Reinstrumentasi Strategi Anti-Gerilya Melalui Pendekatan Legitimasi dan Collaborative Governance Dalam Penanganan Keamanan di Papua*. Riset kolaboratif dengan Seskoad, Bandung.
- Zeinudin, M., Kumorotomo, W., Saleh, S., & Hadna, A. H. (2019). *Menakar Haluan Pembangunan Kota Batam Ke Depan Studi Komparasi Antara Kebijakan FTZ KEK Dan Otonomi Khusus Tahun* (1st ed.). Deepublish.
- Hadna, A. H., Ikhsanto, M. A., Kiswanto, E., & Ardiansyah, J. (2017). *Political Linkages dan Model Representasi Politik di Indonesia* (1st ed.). Indie Book Corner.

### **Book Chapter:**

- Hadna, A. H. (2017). Policy Termination: *Suatu Tahapan yang Hilang dalam Proses Kebijakan, Belajar dari Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*. In A. H. Hadna & E. A. Purwanto (Eds.), *Administrasi Publik Indigeneous* (1st ed., Vol. 1, Issue 1, p. 178). Gava Media.
- Hadna, A. H. (2016). *Policy Termination: A Missing Link dalam Proses Kebijakan: Belajar dari Kebijakan Pengentasan Kemiskinan*. In A. Subarsono (Ed.), *Administrasi Publik Indigeneous* (1st ed., p. 240). Gava Media.

### **Prosiding**

- Sulaiman, T., Hadna, A., Darwin, M., & Kutaneegara, P. (2023). *Performance Improvement Models on Military Operations Other Than War in Managing COVID-19: Public Service Motivation, and Job Satisfaction for The Kodam*

VI/Mulawarman Army. <https://doi.org/10.4108/eai.4-11-2022.2337380>

- Hadna, A. H., Sekarjati, C., & Imawan, S. A. (2020). *Policy Gap and Social Determinants of Public Services for Women in Indonesia: Rethinking the Social World in the 21st Century*, 59–69.
- Arini, F. D., Widaningrum, A., & Hadna, A. H. (2020). *Poverty Reduction and Financial Literacy for Women in Indonesia. Advances in Economics, Business and Management Research, 122*(Annual Conference of Indonesian Association for Public Administration (IAPA 2019)), 241–258. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200301.013>
- Zaenuddin, M., Kumorotomo, W., & Hadna, A. H. (2018). *Identifikasi Permasalahan Pasca Diterapkan Otonomi Daerah Di Kota Batam Dan Alternatif Solusi Kebijakan Mendatang*. 1095–1105. <https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/semnas/article/view/3441%0A>  
<https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/semnas/article/download/3441/2918>